

SMERU



**FRIEDRICH
EBERT
STIFTUNG**

Laporan Lokakarya

Akuntabilitas Publik Ornop: *Isu dan Prakteknya*

Temuan, pandangan dan interpretasi dalam laporan ini digali oleh masing-masing individu dan tidak berhubungan atau mewakili Lembaga Penelitian SMERU maupun lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan SMERU. Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi kami di nomor telepon: 62-21-336336; Faks: 62-21-330850; E-mail: smeru@smeru.or.id; Web: www.smeru.or.id

Hariyanti Sadaly

Agustus 2002

KATA PENGANTAR

Sejak era reformasi lahir di Indonesia pada tahun 1998, kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan berdiskusi secara terbuka telah merasuk di semua kalangan masyarakat Indonesia. Namun, bersamaan dengan itu tuntutan terhadap perlunya “Akuntabilitas Publik” tiba-tiba menjadi bahan pembicaraan hangat. Akibatnya, tuntutan terhadap keterbukaan dan transparansi di pemerintah, kelompok masyarakat madani, dan sektor swasta juga tinggi. Demikian pula kecenderungan saling mengkritik terhadap apa yang sudah dilakukan oleh seseorang, instansi, atau suatu lembaga mengenai kedua hal ini juga tidak dapat dihindari.

Ketika SMERU mengunjungi sejumlah Ornop di beberapa propinsi di Jawa dan Sumatra, juga ketika berdiskusi melalui jaringan *e-mail* dengan Ornop di Indonesia, SMERU banyak menerima pertanyaan mengenai “apa sebenarnya akuntabilitas itu, dan bagaimana kita bisa menjadi lebih akuntabel”. Sebenarnya, pertanyaan teman-teman Ornop itu adalah untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akuntabilitas dan transparansi di pemerintah, sektor swasta dan di kalangan Ornop sendiri.

Ornop dan masyarakat sipil mempunyai peranan sangat penting dalam proses pembentukan bangsa Indonesia dari masa transisi ke era demokrasi. Ornop dan kelompok masyarakat sipil seharusnya dapat membawakan aspirasi rakyat kepada pemerintah serta membuat pemerintah lebih akuntabel kepada rakyatnya. Tetapi, Ornop juga harus melaksanakan prinsip-prinsip “*good governance*”, termasuk transparansi, rasa keadilan, dan akuntabilitas, di dalam sistem manajemen mereka sendiri untuk mendapat kepercayaan dan dukungan dari *stakeholder*-nya, yaitu rakyat.

Sampai saat ini, Ornop dikenal sebagai organisasi yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, bekerja bersama-sama dengan masyarakat, dan kritis terhadap pemerintah. Namun kini mulai muncul pendapat bahwa Ornop selalu mengkritik pihak lain, tetapi tidak mau dan tidak suka dikritik. Juga ada Ornop yang dianggap tidak transparan mengenai apa yang mereka kerjakan, sementara yang lain dituduh lebih membawa keinginan Ornop itu sendiri dibanding dengan keinginan masyarakat yang di atasnamakan. Salah satu contoh penyalahgunaan dana oleh Ornop yang memalukan baru-baru ini, adalah kasus Kredit Usaha Tani yang penyalurannya diserahkan kepada Ornop tetapi tidak dipertanggungjawabkan dengan benar oleh Ornop yang bersangkutan. Kasus ini membuat sebagian masyarakat kehilangan kepercayaan dan mencurigai sepak-terjang Ornop. Untuk menanggapi pertanyaan dan masalah seputar akuntabilitas publik, SMERU dengan dukungan dana dari Friedrich Ebert Stiftung (FES) Jakarta dan bekerja sama dengan Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta mengadakan lokakarya sehari dengan topik “Akuntabilitas Publik dan Ornop: Isu dan Pelaksanaan” pada tanggal 14 November 2001 di Hotel Saphir, Yogyakarta.

Tujuan lokakarya ini adalah untuk memperkaya wacana mengenai akuntabilitas publik di antara sesama Ornop yang mempunyai kepedulian pada proses pengembangan demokrasi di Indonesia.

Tiga pembicara dalam lokakarya ini adalah Bpk. Alimaturahim dari FORMAS Kendari, dengan topik “Pengelolaan Pembangunan yang Akuntabel: Pengalaman Ornop di Lapangan”; Bpk. Teten Masduki dari ICW dengan topik “*Public Accountability* Ornop” dan Bpk. Hendardi dari PBHI dengan topik “Transparansi dan Akuntabilitas dalam Negara Demokrasi Modern”.

Lokakarya ini dihadiri oleh 80 peserta dari Ornop di Jawa, pers lokal, perguruan tinggi swasta di Yogyakarta dan Semarang, dan aparat pemerintah Propinsi DI Yogyakarta.

SMERU mengucapkan terima kasih kepada Friedrich Ebert Stiftung (FES) yang telah mendanai lokakarya ini, juga kepada staf dan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Duta Wacana yang membantu penyelenggaraan lokakarya dan yang telah mendanai lokakarya ini. Akhirnya, terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan SMERU atas dukungan dan masukan yang diberikan sehingga lokakarya ini dapat terselenggara dengan baik.

Salam.

Jakarta, Agustus 2002

Hariyanti Sadaly
NGO Partnership Coordinator

AGENDA LOKAKARYA

Akuntabilitas Publik dan Ornop: Isu dan Prakteknya

Rabu, 14 November 2001

Hotel Saphir, Yogyakarta

Waktu	Topik	Speaker	Moderator
09.00-09:30	Registrasi		
09:30-10:00	Pembukaan	John Maxwell Bambang Hediono	
10:00-10:30	Jeda Kopi		
10:30-11:00	Pengelolaan Pembangunan Yang Akuntabel: Pengalaman Ornop Di Lapangan	Alimaturahim,	Murti Lestari
11:00-12:00	Diskusi		Murti Lestari
12:00-13:00	Makan Siang		
13:00-13:30	<i>Public Accountability</i> Ornop	Teten Masduki	Purnawan H
13:30-14:30	Diskusi		Purnawan H
14:30-15:00	Jeda Kopi		
15:00-15:30	Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Negara Demokratis Modern	Hendardi	Imam Prakoso
15:30-16:30	Diskusi		Imam Prakoso
16:30-17:00	Penutup	Hariyanti Sadaly Murti Lestari	

DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
AGENDA LOKAKARYA	iii
DAFTAR ISI	iv
PEMBUKAAN	1
PENGELOLAAN PENGEMBANGAN YANG AKUNTABEL (PENGALAMAN ORNOP DI LAPANGAN)	4
Pendahuluan	4
Latar Belakang	5
Instrumen Pembangunan yang Akuntabel dan Penerapannya	6
Penutup	8
Notulen	10
<i>PUBLIC ACCOUNTABILITY ORNOP</i>	17
Implementasi Prinsip <i>NGO Governance</i>	18
Notulen	20
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM NEGARA DEMOKRATIS MODERN	28
Konsep Negara Demokratis Modern	28
Tantangan Transparansi Politik	29
Notulen	31
KOMENTAR PESERTA WORKSHOP AKUNTABILITAS PUBLIK DAN ORNOP: ISU DAN IMPLEMENTASINYA	37
DAFTAR PESERTA WORKSHOP	39

PEMBUKAAN

Sambutan Dr. John Maxwell, Lembaga Penelitian SMERU

Lokakarya ini diselenggarakan oleh 3 organisasi, yaitu Lembaga Penelitian SMERU, Friedrich Ebert Stiftung (FES), dan Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta. Topik lokakarya ini sangat penting dan sedang hangat dibicarakan. Harapan kami para peserta seminar akan mendapat gagasan, konsep, dan inspirasi baru yang bermanfaat untuk kegiatannya masing-masing.

Lembaga Penelitian SMERU sebetulnya juga adalah sebuah Ornop yang didirikan pada awal tahun 2001. Lembaga penelitian ini menaruh perhatian pada masalah-masalah sosial-ekonomi dan kemiskinan. Saat ini SMERU mempunyai tiga divisi penelitian, yaitu Divisi Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah yang meneliti masalah otonomi daerah, salah satu topik yang sangat penting untuk Indonesia pada saat ini; Divisi Analisis Kuantitatif terhadap Kemiskinan dan Kondisi Sosial yang melakukan analisis berbagai data untuk mengkaji antara lain permasalahan sistem perlindungan sosial, kemiskinan dan kondisi pasar tenaga kerja; dan Divisi Pemantauan Sosial dan Analisa Kualitatif. Tim Peneliti Divisi ini selalu turun ke daerah untuk mengadakan penelitian mengenai dampak program serta kebijakan pemerintah, misalnya dampak program JPS, subsidi BBM, dan program lainnya. Selain tiga divisi tersebut, SMERU juga mempunyai divisi kecil yang ditangani oleh ibu Hariyanti Sadaly yang menangani NGO liaison untuk SMERU.

Oleh karena lokakarya ini mengenai akuntabilitas publik, maka SMERU juga harus dijelaskan posisinya. Lembaga Penelitian SMERU, seperti Ornop lainnya, menerima bantuan dari beberapa lembaga donor, yaitu AusAID, Ford Foundation, dan USAID. SMERU telah menandatangani persetujuan dengan para donor ini, karena itu sebagai pertanggungjawabannya setiap tahun SMERU melaksanakan *Project Coordination Committee Meeting* yang dilengkapi dengan laporan tertulis tentang kegiatan SMERU. Pada akhir tahun SMERU harus mengadakan audit secara independen. Laporan audit ini dikirimkan kepada pihak donor.

Sebagai Ornop, Lembaga Penelitian SMERU bekerja di bawah payung Yayasan SMERU yang didirikan dengan akte notaris dan mempunyai Badan Pengurus yang sebagian besar anggotanya dari luar SMERU. Badan Pengurus ini diketuai oleh seorang peneliti senior yang jujur, Bpk. Dr. Thee Kian Wie yang baru pensiun dari LIPI. Untuk mengetahui lebih banyak tentang SMERU, silahkan membuka website SMERU. Semua laporan dan kegiatan SMERU sejak awal dimuat di dalam website kami.

Selama 4 tahun terakhir ini saya telah mempunyai beberapa pengalaman dengan dunia NGO di Indonesia yang relevan dengan lokakarya ini. Pertama, ketika bekerja menjadi konsultan untuk Program Padat Karya Desa di 4 propinsi di Indonesia Timur. Program ini bertujuan membantu masyarakat desa mengatasi persediaan pangan yang hampir habis karena musim kering yang panjang akibat fenomena El Nino. Di tiap propinsi program ini merekrut 50 tenaga fasilitator desa melalui Ornop setempat. Tugas fasilitator adalah mensosialisasikan proyek dan membantu aspek

administrasi panitia proyek di tingkat desa. Dalam pelaksanaannya, ternyata ditemukan penyimpangan-penyimpangan, baik penyimpangan teknis maupun dana. Yang paling menyedihkan adalah adanya penyimpangan dana oleh fasilitator desa maupun pejabat Ornop yang terlibat dalam program. Namun, ada juga fasilitator yang jujur dan tidak mau disuap atau menandatangani laporan yang tidak benar meskipun mendapat ancaman atau teror dari Camat, Ketua Bappeda atau polisi setempat.

Pengalaman lain adalah ketika mengadakan penelitian dengan SMERU mengenai Dampak Krisis Ekonomi terhadap Tenaga Kerja Terdidik yang TerPHK di Sektor Formal. Dari hasil wawancara dengan beberapa bekas pegawai bank diketahui bahwa banyak terjadi penyalahgunaan dana KUT oleh Ornop penyalur dana KUT, dan banyak petani yang ditipu oleh para Ornop tersebut. Kasus ini merupakan noda hitam bagi pergerakan Ornop di Indonesia. Disinilah pentingnya akuntabilitas publik.

Saat ini ada ribuan, mungkin puluhan ribu Ornop di Indonesia yang terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada Ornop lama yang menaruh perhatian pada pembangunan masyarakat, beberapa diantaranya disebut BINGO atau *Big NGOs*. Namun ada pula Ornop yang menolak pekerjaan tersebut. Mereka memilih untuk lebih melibatkan diri dalam kegiatan advokasi. Kegiatan Ornop yang terakhir ini sering terdengar melalui komentar dan kecaman mereka terhadap program-program pemerintah, apalagi setelah era reformasi, krisis ekonomi dan program JPS yang kacau-balau. Ada pula Ornop yang bersedia bekerjasama dengan pemerintah sebagai mitra dalam program atau proyek di tingkat akar rumput. Ornop ini sering disebut Ornop "plat merah". Selain itu, ada juga kelompok yang menyebut dirinya Ornop, tetapi kegiatannya tidak berbeda dengan perusahaan konsultan, hanya mencari proyek dan keuntungan semata. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa dunia Ornop Indonesia sampai sekarang belum siap mengatasi suatu dilema yang dapat dicerminkan dalam pepatah Inggris, bahwa orang yang hidup di menara kaca sebaiknya tidak melempar batu.

Seorang staf senior dari salah satu lembaga dana yang banyak membantu Ornop Indonesia mengatakan bahwa bila Ornop Indonesia tidak berbenah diri dengan cara kerja yang jujur, terbuka dan mempunyai akuntabilitas kepada publik, maka pasti akan muncul tekanan dari luar dengan cara menetapkan suatu peraturan yang akan memaksa Ornop Indonesia. Ini adalah sesuatu yang buruk bagi proses pergerakan Ornop di Indonesia. Untuk menghindari hal tersebut, harus ada keinginan dari Ornop sendiri untuk membuat suatu proses penyaringan, pendaftaran, penilaian dan pengesahan yang dapat membedakan antara Ornop yang benar dan yang palsu, atau yang menyeleweng. Apakah Ornop Indonesia siap menghadapi tantangan ini? Kiranya perlu ada introspeksi dan diskusi bersama yang mendalam antara sesama Ornop, dengan demikian lokakarya semacam ini sangat diperlukan.

**Sambutan Drs. Bambang Hediono, MBA
Pembantu Rektor I, Universitas Kristen Duta Wacana.**

Universitas Kristen Duta Wacana dapat juga disebut sebagai Ornop karena tidak mendapat dana dan bantuan dari pemerintah, dan bukan lembaga pemerintah.

Saat ini di Indonesia dengan sangat tiba-tiba ada istilah baru yang ramai dibicarakan orang, yaitu akuntabilitas, padahal istilah tersebut sebetulnya adalah istilah lama. Sesungguhnya akuntabilitas dan teknologi mempunyai nasib yang sama. Teknologi selalu ditunggu namun, selalu menjadi hujatan kesalahan dari suatu proses teknologi, termasuk mengenai sistem, peralatan, dan lain sebagainya. Demikian juga akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sesuatu yang selalu harus dilakukan, tetapi pada akhirnya menjadi sesuatu yang disalahkan, contohnya karena akuntabilitas yang jelek. Berikutnya yang akan disalahkan adalah pendidikan. Karena pendidikan yang tidak baik, atau karena kurikulum dan silabus yang jelek maka akuntabilitas menjadi buruk. Selanjutnya, karena pendidikan yang buruk maka teknologi menjadi jelek. Itulah nasib pendidikan. Memang, di negara kita pendidikan dan lembaga pendidikan, termasuk penelitian-penelitiannya, adalah sesuatu yang paling sering ditinggalkan.

Saya mengucapkan terima kasih kepada SMERU dan FES yang mau memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan dalam kegiatan seperti ini. Diharapkan tidak hanya di Yogya saja lembaga pendidikan dilibatkan dalam segenap kegiatan Ornop, agar lembaga pendidikan tidak menjadi korban yang selalu disalahkan. Saat ini perusahaan-perusahaan di Indonesia masih belum mau menggunakan lembaga pendidikan sebagai sarana penelitiannya, karena mereka masih percaya kepada penemuan-penemuan teknologi dari luar. Tidak heran jika Indonesia ketinggalan di bidang riset.

PENGELOLAAN PEMBANGUNAN YANG AKUNTABEL: PENGALAMAN ORNOP DI LAPANGAN ¹

Oleh:
Alimaturahim
Forum Masyarakat Sipil
(FORMAS)

I. PENDAHULUAN

Suatu kegiatan pembangunan – terutama yang dikelola oleh organisasi-organisasi non-pemerintah (Ornop) maupun organisasi-organisasi masyarakat sipil (OMS) – pada hakekatnya dituntut agar dapat memberikan kepuasan politik (*political satisfaction*) kepada empat kelompok utama yang terkait, yaitu: (1) masyarakat yang menjadi penerima manfaat (*beneficiaries*) atau kelompok sasaran (*target groups*) serta pihak-pihak lainnya yang berkepentingan (*stakeholders*); (2) pihak penyandang dana atau lembaga donor; (3) pemerintah selaku administrator pembangunan; dan (4) para pengelola pembangunan itu sendiri – dalam hal ini Ornop atau OMS yang bersangkutan. Tanpa memuaskan ke empat kelompok ini, maka kelestarian pembangunan (*sustainability of development*) menjadi terancam.

Untuk memenuhi kepuasan ke empat kelompok itu diperlukan sejumlah instrumen pertanggung-jawaban (*responsibility*) secara formal berupa sistem pelaporan seperti laporan keuangan (*financial report*), laporan kemajuan (*progress report*) atau laporan naratif, serta berbagai alat verifikasi lainnya. Namun dalam praktek, bentuk-bentuk pertanggung-jawaban seperti ini kerap kurang memuaskan bagi sebagian besar dari ke empat kelompok tersebut. Oleh sebab itu, perlu ada pertanggungjawaban lainnya yang lebih substansial, yakni akuntabilitas.

Seperti yang dikemukakan The Liang Gie dkk., **akuntabilitas** (*accountability*) adalah kesadaran dari seorang pengelola kepentingan publik untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya tanpa menuntut untuk disaksikan oleh pihak-pihak lain yang menjadi sasaran pertanggungjawabannya. Perbedaan antara *responsibility* dengan *accountability* adalah tanggung jawab dalam konteks *responsibility* ditujukan oleh seorang pengelola kepentingan publik kepada pihak-pihak lain, sedangkan tanggung jawab dalam konteks *accountability* ditujukan oleh seorang pengelola kepentingan publik kepada dirinya sendiri.

Meskipun sangat substansial, namun hingga kini akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan lebih menonjol sebagai wacana ketimbang praktek dalam realita akibat cukup banyaknya kendala untuk merealisasikannya. Di samping itu, sistem

¹ Bahan diskusi yang disajikan dalam Lokakarya Nasional tentang Akuntabilitas Publik dan Ornop yang diselenggarakan oleh SMERU bekerjasama dengan FES dan Universitas Satya Wacana di Hotel Century Saphyre, Yogyakarta, tanggal 14 Nopember 2001.

pengelolaan pembangunan yang diterapkan selama seperempat abad era Orde Baru yang sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) – yang hingga kini cenderung masih terus berlangsung – telah menciptakan ekosistem yang tidak kondusif bagi tumbuhnya akuntabilitas di seluruh pelosok negeri ini. Faktor lainnya yang kurang menyenangkan adalah masih adanya segelintir lembaga donor skala kecil yang kurang bijak dimana dalam skema dana bantuannya tidak menyediakan komponen gaji atau honor untuk pengelola proyek. Bagi Ornop-ornop kecil yang mengakses dana bantuan seperti ini namun tak mampu menyediakan gaji atau honor, sukar untuk menghindari praktek korupsi; akuntabilitas pun semakin jauh dari realita.

Namun apapun yang terjadi, akuntabilitas perlu diwujudkan agar pembangunan lebih akseptabel dan langgeng. Persoalannya sekarang adalah: bagaimana mewujudkan akuntabilitas dalam pembangunan? Atau lebih spesifik lagi: bagaimana menciptakan model pengelolaan pembangunan yang akuntabel? Dalam kaitan inilah FORMAS ingin berbagi pengalaman.

II. LATAR BELAKANG

1. FORMAS

FORMAS adalah singkatan dari Forum Masyarakat Sipil (*Civil Society Forum*). Forum ini didirikan oleh 30 pimpinan organisasi masyarakat sipil (OMS) dan kelompok swadaya masyarakat (KSM) di Sulawesi Tenggara, pada tanggal 7 Maret 1999 namun dideklarasikan baru pada tanggal 9 Oktober 2000. Kini FORMAS beranggotakan 81 OMS dan KSM dari seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Tujuan FORMAS adalah memfasilitasi masyarakat sipil dalam memajukan demokrasi, hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan. FORMAS bekerja untuk dan bersama-sama dengan ke-81 OMS dan KSM tersebut. Kegiatan utama FORMAS ialah pengembangan kapasitas, konservasi sumberdaya alam, kampanye publik, demonstrasi, dialog publik interaktif di radio, polling, dan publikasi.

FORMAS dikelola oleh sebuah *Steering Committee* (SC) dan *Organizing Committee* (OC). SC dikendalikan oleh ketua, sekretaris dan 81 OMS dan KSM sebagai anggota tetap FORMAS. SC mengontrol sepenuhnya kebijakan dan agenda FORMAS lalu menugaskan OC untuk melaksanakannya. OC terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan 5 Koordinator Program yaitu: (1) Koordinator Program Demokrasi, (2) Koordinator Program Hak Azasi Manusia, (3) Koordinator Program Koreksi Kebijakan Publik, (4) Koordinator Program Konservasi Keragaman Hayati, dan (5) Koordinator Program Pengentasan Kemiskinan.

2. Pentingnya Akuntabilitas Bagi FORMAS

Seperti telah diuraikan di atas, FORMAS adalah suatu forum yang beranggotakan 81 OMS dan KSM yang sangat beragam. Organisasi-organisasi anggota ini umumnya sangat kritis menyebabkan FORMAS sangat dinamis namun juga rentan terhadap perpecahan serta berbagai konflik internal. Dalam upaya menjaga keutuhan organisasi, FORMAS berusaha keras meningkatkan kinerjanya agar lebih akseptabel bagi para anggotanya. Dalam kaitan ini, akuntabilitas – di samping

formal responsibility – menjadi sangat vital bagi ketahanan dan kelangsungan hidup FORMAS.

Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas secara internal, FORMAS telah merancang dan menerapkan sejumlah prosedur tetap (protap) yang akuntabel sehingga kinerja organisasi lebih memuaskan bagi para anggota. Protap-protap yang telah disusun dan diterapkan antara lain adalah protap pencarian dana (*fundraising*), protap pengelolaan keuangan, protap penetapan personil proyek, dan sebagainya. Semua protap ini terus-menerus dievaluasi dan direvisi agar lebih akuntabel, akseptabel, dan efektif. Dalam pengelolaan kegiatan-kegiatan pembangunan, FORMAS pun telah mendesain dan menerapkan sejumlah instrumen pengelolaan pembangunan yang juga akuntabel.

III. INSTRUMEN PEMBANGUNAN YANG AKUNTABEL DAN PENERAPANNYA

1. Jenis dan Prinsip

FORMAS telah mendesain dan menerapkan dua jenis instrumen pengelolaan pembangunan pedesaan atau pengembangan masyarakat (*community development*) yang akuntabel. Jenis instrumen yang pertama diperuntukkan bagi kelompok sasaran (*target groups*) yang sebagian anggotanya tidak “melek” huruf; sedangkan jenis yang kedua adalah untuk kelompok sasaran yang relatif “melek” huruf. Pada hakekatnya instrumen-instrumen ini didisain berdasarkan sejumlah pengalaman dari negara-negara berkembang lainnya di Asia, Afrika dan Amerika Latin, yang kemudian dipadukan dengan pengalaman dan gagasan dari para anggota FORMAS; sintesis ini menghasilkan suatu instrumen pengelolaan pembangunan yang bukan hanya efisien dan efektif, melainkan juga akuntabel – lebih-lebih setelah dibandingkan dengan pengalaman para organisasi anggota FORMAS di masa lalu.

Instrumen-instrumen ini diupayakan agar selalu bertumpu di atas prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

- **Keterlibatan (*involvement*):** keempat kelompok yang terkait itu – yaitu masyarakat (utamanya kelompok sasaran), lembaga donor, pemerintah, dan Ornop/OMS yang bersangkutan – perlu terlibat penuh dalam seluruh rangkaian proses pengelolaan pembangunan, yakni identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi. Namun, pada dasarnya aspirasi, kepentingan dan prakarsa itu harus dirangsang agar tumbuh dari bawah (*bottom-up*), tidak boleh dipaksakan dari atas (*top-down*).
- **Transparansi:** kegiatan pembangunan harus dikelola dengan setransparan mungkin. Keempat kelompok terkait itu (masyarakat, donor, pemerintah dan Ornop/OMS yang bersangkutan) harus diberi wewenang berupa kemudahan untuk mengakses semua data dan informasi yang terkait dengan kebijakan serta kegiatan pembangunan yang bersangkutan, termasuk rincian anggaran yang telah maupun yang belum digunakan.
- **Kontrol sumberdaya oleh kelompok sasaran:** masyarakat selaku kelompok sasaran harus mendapat wewenang (*entitlement*) untuk mengontrol (meskipun tidak menguasai langsung) seluruh sumber daya pembangunan, utamanya dana;

sebab pada hakekatnya semua sumber daya pembangunan adalah milik publik, khususnya kelompok sasaran. Dalam wacana pembangunan, batas antara **memberdayakan** masyarakat dengan **memperdayakan** masyarakat sangatlah kabur. Bedanya, yang disebut terakhir ini tidak memberi wewenang kepada kelompok sasaran untuk mengontrol sumber daya pembangunan.

2. Hasil yang Dicapai

Kedua jenis instrumen pembangunan yang akuntabel ini telah diterapkan oleh seluruh organisasi anggota FORMAS dalam berbagai kegiatan pembangunan mereka di lokasi-lokasi proyeknya masing-masing. Dalam rangka ini, FORMAS telah melatih para koordinator program serta fasilitator lapangan agar mereka dapat menggunakan instrumen-instrumen itu dengan baik. Hasil-hasil yang telah mereka capai selama ini berkat diterapkannya instrumen-instrumen tersebut adalah:

- Meningkatnya rasa saling percaya – yang pada gilirannya menjadi faktor pendorong kerjasama yang sangat efektif – di kalangan keempat pihak terkait tersebut (masyarakat, lembaga donor, pemerintah dan Ornop/OMS yang bersangkutan).
- Tumbuhnya kelompok-kelompok sasaran yang kuat dan mandiri secara ekonomi maupun politik;
- Sangat tingginya kontribusi masyarakat terhadap pembangunan. Dalam Proyek Empang Parit di Kabupaten Muna, misalnya, dana yang tersedia hanya Rp 55 juta. Setelah dievaluasi secara independen oleh Pemda Kabupaten Muna, ternyata nilai proyek ini seluruhnya berjumlah lebih dari Rp 200 juta.
- Adanya kesediaan dari pemerintah propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa, untuk memberikan kontribusi, baik berupa dana maupun tenaga dan fasilitas.
- Meningkatnya kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap pengembangan budaya demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, keadilan jender, pelestarian lingkungan hidup dan kepemimpinan rakyat; semua ini merupakan arus-utama dari proses pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan melalui instrumen pembangunan yang akuntabel tersebut.

3. Pelajaran yang Dipetik

Hikmah yang dipetik dari instrumen pengelolaan pembangunan yang akuntabel ini adalah:

- Ternyata dengan menerapkan metode pengelolaan pembangunan yang akuntabel – yang sangat transparan – pengelolaan pembangunan menjadi lebih akseptabel, efisien, efektif dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Pengelolaan pembangunan yang akuntabel merangsang tumbuhnya rasa memiliki (*sense of belonging*) dan partisipasi yang merupakan faktor-faktor penentu keberhasilan pembangunan yang sangat krusial.

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan

- Guna mencapai kelestarian pembangunan, perlu ada upaya untuk memberi kepuasan politik kepada empat kelompok utama yang terkait, yaitu masyarakat, lembaga donor, pemerintah, dan Ornop/OMS yang bersangkutan. Dalam rangka ini perlu ada pertanggung-jawaban secara formal yang dilengkapi dengan pertanggung-jawaban secara substansial yang disebut akuntabilitas. Secara spesifik diperlukan adanya instrumen pengelolaan pembangunan yang akuntabel.
- Instrumen pengelolaan pembangunan yang akuntabel harus bertumpu di atas tiga prinsip dasar, yakni: **keterlibatan, transparansi, dan kontrol sumberdaya oleh kelompok sasaran**. Tanpa hal yang terakhir ini, kita akan cenderung **mempertanyakan** ketimbang **memberdayakan** masyarakat.
- FORMAS telah berusaha mengembangkan instrumen pengelolaan pembangunan yang akuntabel yang ternyata sangat akseptabel, efisien dan efektif serta berdaya-tangkal terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme sekaligus merangsang tumbuhnya rasa memiliki (*sense of belonging*) dan partisipasi yang merupakan faktor-faktor penentu keberhasilan pembangunan yang sangat krusial.

2. Saran

- Diharapkan agar instrumen pengelolaan pembangunan yang akuntabel ini dapat disempurnakan oleh para pembuat kebijakan maupun para praktisi pembangunan, baik di kalangan pemerintah maupun non-pemerintah, utamanya para peneliti pembangunan serta kalangan Ornop/OMS, sehingga ke depan nanti pengelolaan pembangunan bakal lebih efisien, efektif dan akseptabel.
- Pihak pemerintah dan kalangan donor diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan instrumen pengelolaan pembangunan yang akuntabel ini. Kontribusi tersebut antara lain berupa penyediaan sumberdaya untuk kegiatan penelitian, seminar, lokakarya pelatihan, serta publikasi instrumen ini dalam bentuk buku dan CD-ROM.
- Instrumen pengelolaan pembangunan yang akuntabel ini juga perlu dipertimbangkan untuk diterapkan di kalangan lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang telah dibentuk oleh pemerintah di tiap desa di seluruh Indonesia dalam rangka otonomi daerah. Pada kenyataannya, lembaga-lembaga tersebut banyak yang mandek utamanya karena kelemahan manajemen.

Lampiran:

Manual Pemberdayaan Masyarakat – Bagian 1 Perencanaan.

NOTULEN

Pembicara	Ali Maturahim (FORMAS Kendari, Sultra)
Moderator	Murti Lestari

Pemaparan Ali Maturahim

Pak Ali mencoba menyampaikan pengalaman dan berbagi pengalaman dengan para peserta mengenai topik Pengelolaan Pembangunan yang Akuntabel.

Menurutnya akuntabilitas bukanlah sesuatu hal yang baru, namun akhir-akhir ini isu akuntabilitas muncul ke permukaan karena banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan penderitaan masyarakat di lapangan. Penderitaan rakyat itu erat kaitannya dengan kinerja Ornop sehingga masalah akuntabilitas muncul ke permukaan, bahkan menjadi tuntutan.

Kegiatan pembangunan yang dilakukan terutama oleh Ornop di lapangan, harus memberi kepuasan politik kepada empat kelompok, yaitu masyarakat yang dilayani, pemerintah sebagai administrator pembangunan, penyandang dana yang memberi dana. Pemerintah dapat juga bertindak sebagai penyandang dana, seperti di beberapa daerah di Sulawesi Tenggara, Bappeda menjadi lembaga dana membiayai kegiatan LSM. Kelompok yang terakhir adalah kelompok Ornop yang terlibat dalam kegiatan pembangunan itu. Untuk memuaskan keempat kelompok ini, perlu adanya pertanggungjawaban formal seperti laporan keuangan atau laporan perkembangan kegiatan dan lain sebagainya, namun kadang-kadang hal ini tidak memuaskan karena pertanggung jawaban tersebut dapat direayasa. Laporan dapat dibuat dengan baik dan rapi, tetapi berbeda dengan kenyataan di lapangan. Sehingga selain bentuk pertanggungjawaban formal seperti itu, kita membutuhkan pertanggungjawaban dalam bentuk lain, yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban yang sangat esensial.

Pak Ali memberi contoh bagaimana merancang suatu program pembangunan bersama-sama masyarakat. Proposal pembangunan dibuat bersama masyarakat, Ornop hanya memperbaiki bahasanya. Menurut pengalaman Pak Ali di lapangan, masyarakat ikut menyusun proposal tersebut dan dana dikontrol oleh masyarakat. Proposal yang sudah disetujui harus ada rekamannya disetiap kelompok masyarakat yang dapat dilihat setiap saat. Masyarakat harus mengetahui penggunaan dana secara rinci, mulai dari rencana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Instrumen-instrumen yang digunakan di lapangan dalam melaksanakan program pembangunan yang akuntabel meliputi 3 prinsip, yaitu:

1. Keterlibatan

Empat kelompok tersebut harus terlibat penuh dalam seluruh rangkaian proses pembangunan, mulai dari identifikasi kebutuhan dan masalah, perencanaan termasuk

penyusunan skala prioritas, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Juga masyarakat dilibatkan juga dalam perencanaan kembali jika memang dibutuhkan oleh program.

2. Transparan

Empat kelompok tersebut harus diberi wewenang berupa kemudahan mengakses semua data dan informasi yang terkait dengan kebijakan serta kegiatan pembangunan yang bersangkutan, termasuk rincian anggaran yang telah maupun yang belum digunakan.

3. Kontrol Sumberdaya oleh Kelompok Sasaran.

Target grup/kelompok sasaran harus diberi kewenangan untuk mengontrol sumberdaya, dalam arti tidak selamanya menguasai. Kelompok sasaran dapat mengontrol keuangan program setiap saat, tetapi tidak berarti bahwa masyarakat yang memegang dana tersebut. Kita mengenal istilah memberdayakan dan memperdayakan masyarakat. Selama ini kita sesungguhnya memperdayakan bukan memberdayakan masyarakat. Perbedaan antara memberdayakan dan memperdayakan adalah bahwa bila masyarakat ikut mengontrol program itu, adalah memberdayakan dan sebaliknya, bila masyarakat tidak ikut mengontrol program, itu adalah memperdayakan.

Prinsip-prinsip di atas menurut Pak Ali masih banyak kelemahan-kelemahan, tetapi terlihat ada harapan-harapan yang perlu dikembangkan. Oleh karena itu Pak Ali berharap dalam seminar ini instrumen-instrumen tersebut dapat disempurnakan. Jika instrumen itu sudah sempurna, dapat kita mintakan kepada pemerintah untuk menjadi keputusan publik yang bisa digunakan dan diakses oleh siapa saja. Selain itu kita juga berharap kepada pemerintah dan lembaga dana agar dapat memberikan berkontribusi sehingga instrumen ini bisa berkembang. Kontribusi tidak selalu harus dalam bentuk dana, namun dapat berupa fasilitas-fasilitas dan restrukturisasi kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan kemudahan bagi Ornop untuk dapat mengembangkan instrumen-instrumen itu, agar pengembangan masyarakat mempunyai nilai pemberdayaan masyarakat.

Pak Ali berharap instrumen ini dapat juga digunakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), sehingga LPM dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Selama ini LPM tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik karena antara lain mereka tidak mempunyai alat sehingga LPM tidak dapat merealisasikan fungsinya dengan baik. Mungkin instrumen ini bisa ditawarkan untuk bisa digunakan dalam upaya memperkuat LPM agar dapat mencapai tujuan dari misinya.

DISKUSI

TERMIN I:

1. Johny Simanjuntak, ATMA Solo

- Masih belum jelas konsep akuntabilitas yang diterapkan pada model Pengelolaan Pembangunan yang dibuat Pak Ali. Bagaimana 3 prinsip (keterlibatan, keterbukaan dan kontrol sumber daya) yang sudah dijelaskan tersebut diterapkan dalam program-program hak azasi.
- Bila kita berbicara mengenai akuntabilitas publik Ornop Indonesia kita harus juga berbicara mengenai misi politik, sosial, budaya dari pemberi dana karena banyak hal yang tidak adil dari NGO internasional terhadap NGO Indonesia.

Jawab:

- Program membangun memang harus mempunyai muatan HAM dan demokrasi. Bila dilihat pada Bagan pada halaman 6, bahwa demokrasi, HAM harus menjadi arus utama (*main stream*). Namun di lapangan ada masyarakat yang tidak memahami demokrasi, HAM, gender atau masalah lingkungan sehingga model ini harus diberi instrumen tambahan untuk memberi pendidikan kepada masyarakat tentang masalah-masalah tersebut. Model ini dibangun untuk program secara *bottom up*, dan berdasarkan pengalaman masyarakat di pedesaan tidak terlalu peduli dengan masalah demokrasi dan HAM sehingga model ini tidak telalu menekankan masalah demokrasi dan HAM, meskipun kita perlu menyadarkan masyarakat bahwa demokrasi dan HAM adalah sesuatu yang penting.
- Pak John Maxwell setuju dengan pernyataan Pak Johny Simanjuntak bahwa lembaga dana dan NGO Internasional juga harus adil, terbuka, dan memperlihatkan bahwa mereka siap dengan akuntabilitas mereka terhadap peran mereka di Indonesia. Namun Pak John Maxwell tidak bisa berbicara atas nama mereka karena Pak John Maxwell bukan dari lembaga dana internasional.

2. Eko Sulistiyo, Gita Pertiwi Solo

- Bagaimana penerapan akuntabilitas bila organisasi tersebut masih berbentuk Yayasan? Menurutnya, bila LSM berbentuk yayasan maka tidak akan ada akuntabilitas, karena di yayasan ada pemilik, ada pendiri, dan sebagainya. Berdasarkan banyak pengalaman, sulit berbicara mengenai keterbukaan didalam organisasi yayasan. Kalau kita ingin berbicara mengenai akuntabilitas publik tetap akan sulit selama LSM masih berbentuk yayasan.
- Masih belum jelas dengan keterlibatan semua pihak pada proses model pembangunan tersebut. Pak Eko hanya melihat keterlibatan dalam mengontrol dan membuat dana dan sebagainya, padahal keterlibatan semua pihak akan menjadi penting pada saat awal menentukan suatu proses kegiatan. Keterlibatan semua *stakeholder* harus di mulai dari rencana kegiatan terutama keterlibatan dari masyarakat.

Jawab:

- Yayasan kadang-kadang tidak cocok untuk kegiatan LSM, selain itu UU Yayasan sepertinya juga tidak padu dengan kegiatan LSM.
- Setuju bahwa keterlibatan masyarakat dalam konteks akuntabilitas bukan hanya dana, proyek atau program tetapi seluruh upaya yang bisa merubah nasib mereka. Lihat Bagan Proses Pemberdayaan Masyarakat (Bagian 1: Perencanaan, 2000, hal 6) bahwa kita harus mulai dengan memahami masyarakat dan masyarakat memahami kita. Kelemahan program pembangunan selama ini, tidak melalui proses memahami masyarakat lebih dahulu, sehingga banyak program yang mengalami kegagalan. Kita harus memahami masyarakat, kemudian menganalisa kebutuhan masyarakat, sehingga kita tidak langsung berbicara mengenai proyek, namun bersama masyarakat terlebih dahulu membangun visi pembangunan.

3. Yusuf, PINBUK Surabaya

- Paradigma pembangunan saat ini sudah berorientasi pada prinsip-prinsip akuntabilitas, partisipatori, transparansi dan *sustainability*, tetapi pada implementasinya masih belum berjalan secara optimal. Salah satu kelemahan pada proyek pembangunan adalah tidak adanya *management fee* untuk lembaga. Bila tidak ada *management fee* untuk lembaga pada sebuah kegiatan, maka akan terjadi “efisiensi”, dan ketika hal tersebut dicoba ditransparansikan kepada empat kelompok yang terlibat, ternyata kelompok sasaran memprotes dengan adanya efisiensi. Padahal Ornop hidup dari kegiatan-kegiatan tersebut, bila tidak ada *management fee* ada kemungkinan Ornop melakukan penyimpangan dana. Untuk itu perlu adanya advokasi baik kepada donor pemerintah maupun donor luar negeri tentang perlunya *management fee* untuk lembaga pada setiap program pembangunan.

Jawab:

- Konsep akuntabilitas sebenarnya bukan hal baru tetapi jarang sekali ada yang mau membawa konsep akademis tersebut ke dunia empiris, kemudian dibawa lagi ke dunia akademis dan seterusnya berulang-ulang, sehingga pada akhirnya akan ada konsep perpaduan antara pengalaman akademis dan pengalaman empiris. Metode ini adalah sebuah tawaran untuk dicoba dilapangan kemudian didiskusikan, diperbaiki kemudian di coba lagi dan begitu seterusnya sampai akuntabilitas publik yang kita inginkan terwujud.
- Pengalaman di Sulawesi Utara, ada donor yang mau memberi *management fee* lembaga terutama dari donor-donor yang ada dikedutaan.

TERMIN II:

1. Ismail Nachu, SPEKTRA Surabaya

- Akuntabilitas adalah sebuah instrumen yang harus dilakukan dan bukan hanya dilakukan oleh LSM saja. Bila kita melihat LSM, LSM adalah sosok yang ambivalen antara lembaga yang punya misi kenabian dan sisi setan. LSM membuat idealisme seperti nabi, tetapi kadang-kadang rakus seperti setan, dan dilema ini harus diatasi. Kalau LSM Indonesia tidak bisa mengatasi dilema ini mungkin akan kehilangan kredibilitasnya di mata publik. Bilamana kita sudah bisa mengatasi problem dilema LSM pasti bisa mengatasi problem akuntabilitas publik di LSM.
- Usul Ismail untuk mengatasi dilema di atas adalah:
 - Orang yang bekerja di LSM harus seorang aktifis LSM bukan pekerja LSM agar tetap dapat memperjuangkan idealisme LSM, namun orang tersebut tidak menggantungkan hidupnya pada lembaga LSM. Aktifis tersebut harus mempunyai pekerjaan lain yang bisa memberikan penghasilan agar tidak tergotha dengan sisi setan LSM.
 - Sistem pemberian/pinjaman dana dari lembaga dana kepada pemerintah Indonesia yang terjadi pada saat ini harus dirubah. Sistem tersebut sangat memungkinkan terjadinya korupsi. Contoh, LSM diminta membuat rencana kegiatan untuk mendapatkan dana dari lembaga dana, namun ketika dana tersebut cair masuk ke kantong pemerintah, pemerintah leluasa mengelola dana tersebut, LSM yang ingin berpartisipasi kegiatan tersebut diharuskan membayar 20% kepada aparat pemerintah.
 - Staf lembaga dana yang terlibat dalam kegiatan program sering tidak adil, mereka berpenghasilan sangat tinggi yang bisa membuat iri staf Ornop. Pola ini harus dirubah.

Jawab:

- Setuju bahwa orang-orang LSM harus aktifis dan bekerja di LSM merupakan pilihan hidupnya, namun untuk mengukur hal-hal tersebut sangat susah, tolok ukurnya tidak ada. Selain itu LSM harus mengelola dana hibah, bukan dana pinjaman karena bila mengelola dana pinjaman akan menambah beban masyarakat. Setuju bahwa aktifis LSM tersebut harus mempunyai pendapatan dari pekerjaan lain.

2. Endang, BISMI Jakarta

- Pengalaman Lembaga BISMI ketika membuat program bersama-sama dengan masyarakat sering terjadi masalah di tingkat masyarakat, mungkin masyarakat dalam akuntabilitas belum siap. Siapa sesungguhnya yang menentukan akuntabilitas di tingkat masyarakat?
- Mekanisme seperti apa yang harus dirumuskan bersama antara Ornop dan masyarakat agar tidak terjadi masalah di akhir program?

Jawab:

- Tidak sependapat bahwa dikatakan masyarakat belum siap. Menurutnya masyarakat selalu siap. Jika di dalam kegiatan pembangunan kelihatannya masyarakat belum siap, kita harus mengadakan koreksi diri (*self correction*), kira-kira kendalanya di mana, mungkin instrumennya yang salah atau instrumennya sudah benar namun pelaksanaannya yang salah, atau yang lain. Kendala yang paling besar pada LSM adalah kendala struktural, yaitu kendala dari keburukan pemerintah. Kemudian kendala lainnya adalah kendala kultural, yaitu kendala yang ada pada masyarakat sendiri.

3. Sultoni, Dinas Sosial Propinsi DIY

- Ornop dianggap menjadi tumpuan keberhasilan pembangunan, berharap bahwa Ornop terus bisa menjaga akuntabilitasnya.
- Program Pembangunan di setiap daerah berbeda hasilnya, tergantung dari moralitas si pelaku pembangunan, mungkin dalam hal ini kita perlu berfikir tentang moralitas yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku pembangunan baik oleh pemerintah, Ornop dan masyarakat sendiri, bila tidak tujuan yang akan dicapai tidak terwujud.
- Masyarakat saat ini belum mampu dalam melaksanakan kegiatan, sehingga diperlukan adanya pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, pengetahuan dan sebagainya.

TERMIN III:

1. Trias Prasetyo, Mitra Tani Yogyakarta

- Tidak setuju dengan istilah hanya akuntabilitas, harus ada tekanan istilah sosial sehingga istilahnya menjadi akuntabilitas sosial.
- Akuntabilitas dapat membantu peningkatan peran Ornop, namun di sisi lain dapat juga mengebiri peran Ornop. Contoh yang dapat membantu Ornop adalah Ornop dapat membuat laporan narasi, keuangan secara baik, kegiatan Ornop terencana dengan baik.
- Menurutnya, contoh laporan akunting dan narasi yang baik hanya salah satu bagian kecil parameter keberhasilan akuntabilitas sosial. Yang paling utama pada keberhasilan akuntabilitas sosial adalah bagaimana kerja Ornop dapat meningkatkan posisi dan peran masyarakat mitranya, paling tidak setara dengan Ornop yang memberdayakannya. Peningkatan ini adalah hal yang paling penting dibandingkan dengan laporan keuangan atau narasi yang baik. Laporan-laporan yang baik tersebut tidak akan berarti bila Ornop masih mensubordinat masyarakat mitranya. Hal ini menunjukkan mengapa kata “akuntabilitas” perlu ditambahkan dengan kata “sosial”.
- Bila kita hanya berbicara mengenai keuangan saja maka kita akan terjebak pada proses administrasi biaya mahal. Contohnya, kita bisa mengeluarkan uang sampai Rp5 juta hanya untuk mencari uang Rp1000 yang terselip,

sehingga proses ini akan menghambat dinamika kerja Ornop. Hal ini akan mengkebiri kerja Ornop.

Jawab:

- Untuk meningkatkan posisi peran masyarakat, pada prinsip model akuntabilitas ini adalah menumbuhkan kepemimpinan rakyat. Jangan kirim tenaga ahli ke desa terlalu banyak, karena tenaga ahli tersebut sering merusak, mereka sering membuat konflik dengan orang desa. Fungsi Ornop hanya membawa sistem namun para pelaku pembangunan sebagian besar adalah masyarakat lokal sehingga kegiatan pembangunan lebih efisien.
- Setuju bahwa lembaga dana juga harus akuntabel, harus ada akuntabilitas di kalangan lembaga dana. Namun model ini tidak terlalu mengarah ke atas, namun lebih mengarah ke bawah (tingkat akar rumput).

2. Nazir, AKPPI Yogyakarta

- Bagaimana bentuk legal formal LSM yang baik, jelaskan? Kalau bentuk legal formal tidak jelas, kemungkinan orang yang mengelola dana pembangunan akan lari, hal ini akan mempengaruhi akuntabilitas publik dari Ornop tersebut, sehingga legal formal LSM itu penting. Apa bentuk legal formal Lembaga Formasi Kendari?
- Bentuk bantuan saat ini adalah dari lembaga dana ke pemerintah kemudian dari pemerintah langsung ke rakyat. Bila ditingkat masyarakat tidak mempunyai lembaga formal yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengelola dana tersebut, bagaimana bentuk pertanggung jawabannya, hal ini akan berbahaya. Apa upaya Formas tentang hal ini?

Jawab :

- Tidak mengetahui legal formal yang baik untuk Ornop. FORMAS Kendari bentuknya bukan yayasan. FORMAS Kendari berbentuk forum, anggotanya adalah LSM.
- Konflik di LSM tidak bisa dihindari, kadang-kadang konflik itu diperlukan supaya ada keterbukaan. Dengan adanya konflik kita bisa melihat suatu masalah lebih tajam.

3. Arief Rohadi, Mitra Swadaya Cirebon

- Satu-satunya kunci supaya akuntabilitas publik berjalan di Ornop adalah melembagakan akuntabilitas menjadi nilai kehidupan masyarakat. Selama ini akuntabilitas masih menjadi tataran wacana, belum melembaga di tingkat masyarakat akar rumput. Bila ini sudah melembaga di tingkat mereka, masyarakat bisa mengontrol kita (Ornop).
- Apakah mungkin akuntabilitas publik terjadi apabila tidak ada perubahan perilaku masyarakat?

Jawab:

- Akuntabilitas tidak merubah nasib masyarakat karena akuntabilitas dibuat bukan untuk merubah nasib masyarakat, yang merubah nasib masyarakat adalah program, tetapi program itu harus akuntabel bila ingin merubah nasib masyarakat.
- Kunci akuntabilitas adalah saling kontrol antar 4 kelompok, yaitu pemerintah, lembaga dana, Ornop dan masyarakat.

PUBLIC ACCOUNTABILITY ORNOP

Oleh

Teten Masduki

Indonesian Corruption Watch (ICW)

Mulai sering kita dengar suara sumbang mengenai Organisasi Non-pemerintah (Ornop), atau pada masa orba lebih dikenal sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), baik dalam hubungannya dengan pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Ada yang terlibat dalam penyimpangan dana JPS, KUT, Bulog atau menjadi pendukung fanatik salah satu kekuatan politik tertentu. Atau Ornop digugat oleh masyarakat yang diperjuangkannya. Sementara dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ORNOP-birokrat yang menakjubkan dari segi jumlah, mungkin ribuan, yang dipicu oleh lembaga-lembaga dana internasional yang mensyaratkan bagi pemerintah untuk kerjasama dengan masyarakat sipil dalam menjalankan proyek-proyek pembangunan yang didanai mereka. Sebagian dari "Ornop birokrat" hasil budidaya pejabat itu ada yang terang-terangan didirikan pejabat pemerintah, berkantor di instansi-instansi pemerintah atau di kediaman pejabat, dan mendapat kucuran dana dari kocek pemerintah.

Di mata masyarakat awam, wajah Ornop tidak semanis dulu, yang dikenal sebagai agen perubahan sosial, tapi mulai bopeng-bopeng dengan noda partisan, korupsi, pemerasan, orientasi profit atau proyek dan seterusnya. Sementara masyarakat Ornop sejati, yang merasa dirugikan oleh kelakuan Ornop gadungan tersebut, tidak memiliki suatu mekanisme untuk menegakan *code of conduct* dan mengeleminisasi mereka. Jurus yang ditempuh kalangan Ornop sekarang ini adalah "biarkan masyarakat menilainya sendiri", sepandai-pandai bangkai menyembunyikan bau akhirnya akan tercium juga.

Terlepas dari adanya kesan buruk tersebut, sekarang ini ada desakan dari masyarakat kepada kalangan Ornop, yang dari hari ke hari tuntutan itu semakin nyata, agar Ornop lebih terbuka, demokratis, jujur dalam mengelola organisasinya dan dalam menjalankan kegiatannya. Suatu hal yang wajar manakala Ornop menuntut sistem pemerintahan yang demokratis, terbuka, jujur dan memihak rakyat kecil, ada tuntutan yang sama terhadap moralitas kalangan Ornop juga.

Jangan lupa legitimasi Ornop terletak pada kepercayaan masyarakat, atau yang mengklaim atas nama rakyat, atau fasilitator atau artikulator kepentingan rakyat, sudah semestinya kalangan Ornop mengembalikan *recovery public trust* tersebut. Dukungan-dukungan dana kepada Ornop dari lembaga donor juga didasarkan atas kepercayaan bahwa dukungannya itu akan digunakan untuk kepentingan kemajuan masyarakat. Seperti pepatah bagai aparat penegak hukum, bagaimana mau membersihkan kotoran kalau sapunya kotor. Atau bagaimana mau mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih baik, kalau agen sosialnya tidak mendapat kepercayaan masyarakat.

Dalam konsep *good governance* (GG), yang sejak krisis ekonomi melanda Indonesia menjadi "mantra" baru dalam upaya untuk mengatur tatanan baru mengenai penggunaan kekuasaan ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan

negara, yang transparan dan bertanggungjawab, partisipatif, efektif, adil dan adanya kepastian hukum, agenda perubahan bukan saja dialamatkan kepada pemerintah, tapi juga kepada sector swasta dan masyarakat sipil. Sebagaimana sudah banyak didiskusikan, konsep GG atau yang banyak diartikan sebagai suatu tata pemerintahan yang baik berakar pada suatu gagasan adanya saling ketergantungan (*interdependence*) dan interaksi dari bermacam-macam aktor kelembagaan di semua level di dalam negara, (DPR, eksekutif, yudikatif, militer), masyarakat madani (LSM, pers, organisasi profesi, gereja, pesantren) dan sektor swasta (perusahaan, lembaga keuangan). Dalam hal ini penting adanya keseimbangan hubungan yang sehat antara negara, masyarakat dan sektor swasta guna mencari suatu kesepakatan bersama menyangkut pengaturan negara, tidak boleh ada aktor kelembagaan di dalam GG yang mempunyai kontrol yang absolut. Masalahnya bagaimana bisa mewujudkan prinsip-prinsip GG, misalnya, *fairness*, transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan *rule of law* di dalam pemerintahan, manakala sektor swasta atau kalangan *civil society* korup, misalnya. Sebab kesuksesan GG akan sangat ditentukan oleh kadar kemauan politik dan *collective action* dari pilar-pilar utama GG.

Karena itu dalam konteks ini, di kalangan bisnis juga kita konsep *good corporate governace*. Yaitu, suatu konsep pengaturan dan pengendalian korporasi yang seimbang antara kepentingan *shareholder* dan *stakeholder*. Sementara ide *governance* belum banyak didiskusikan untuk kepentingan meningkatkan *public accountability* Ornop dalam hubungannya dengan *stakeholder*, dalam hal ini masyarakat . Bahkan tidak sedikit Ornop yang cenderung ingin mempertahankan struktur oligarki di dalam organisasinya, manajemen tertutup, menolak diaudit, perkoncoan, mark up anggaran dan sebagainya. Padahal sekarang ini penting menerapkan konsep *governance* di dalam Ornop guna mengoptimasikan pengelolaan sumberdaya secara disiplin dan bertanggungjawab, peningkatan kontribusi Ornop bagi kemajuan masyarakat, perbaikan citra sebagai agen perubahan social dan demokrasi yang bertanggungjawab, membangun kepercayaan dan meyakinkan masyarakat untuk mendukung dan terlibat aktif dalam setiap perjuangan Ornop dan seterusnya.

IMPLEMENTASI PRINSIP NGO GOVERNANCE

Ornop dan masyarakat sipil lainnya semestinya memelopori penerapan prinsip-prinsip *governance*. Upaya-upaya Ornop untuk menerapkan prinsip *accountability* terhadap masyarakat, memang telah mulai dicoba. Misalnya, Ornop di bidang advokasi hak asasi manusia (HAM) pernah menggelar peradilan bagi aktivis LSM yang melakukan pelecehan seksual terhadap sesama aktivis, harus dilihat sebagai upaya nyata dari dalam Ornop untuk menunjukkan kepada publik bahwa mereka juga tidak tutup mata terhadap penyimpangan di dalam tubuhnya sendiri. Tapi sampai sekarang masih banyak Ornop yang melindungi aktivisnya yang mengkorupsi anggaran, baik dari jerat hukum maupun dari audit lembaga donor, dan enggan melakukan pemecatan. Entah hal itu karena ada kekhawatiran dari kalangan Ornop terbuka aib di masyarakat, yang akan mengancam legitimasinya. Dalam hal ini, hampir sama dengan institusi militer, yang senantiasa melindungi jenderal yang terlibat dalam kejahatan HAM.

Untuk menguji sejauh mana sistem akuntabilitas Ornop terhadap masyarakat, barangkali beberapa pertanyaan berikut ini menarik untuk didiskusikan:

1. Apakah ada pelaporan kepada masyarakat mengenai informasi yang terkait dengan kinerja organisasi (keuangan dan aktifitas), secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten;
2. Apakah ada kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi;
3. Apakah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dan audit yang lazim digunakan dan diterima luas;
4. Apakah ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab dalam kesepakatan dasar organisasi;
5. Apakah ada sistem audit internal;
6. Apakah memiliki *code of conduct* dan sistem untuk menjamin pelaksanaannya, termasuk kewajiban untuk mentaati hukum;
7. Apakah ada sistem untuk menegakan kejujuran (integritas), disiplin dan sanksi dan sistem penilai kinerja personal;
8. Apakah menghormati hak-hak buruh, dan menerapkan keadilan gender;
9. Apakah ada SOP dalam rekrutmen pegawai dan pengadaan barang dan jasa yang bebas KKN;
10. Apakah ada SOP pencarian dana yang menjamin kemandirian organisasi dalam hubungannya dengan pemerintah dan sektor swasta dan bebas KKN;
11. Apakah ada mekanisme untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan program, dan evaluasi kinerja organisasi;
12. Apakah ada mekanisme untuk menerima dan menyelesaikan keluhan-keluhan masyarakat yang diakibatkan oleh aktifitas organisasi; dan
13. Apakah ada cara untuk meminimalkan eksternal negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat.

NOTULEN

Pembicara	Teten Masduki
Moderator	Purnawan Hardiyanto

Pemaparan Teten Masduki

Ada dua hal penting untuk berbicara mengenai akuntabilitas publik dari Ornop. Pertama, karena ada pertumbuhan LSM yang luar biasa, mungkin sekarang jumlahnya menjadi puluhan ribu. Selain mudah untuk mendirikan LSM juga karena kebijakan baru lembaga dana internasional, di mana proyek-proyek pembangunan yang didanai lembaga dana internasional mensyaratkan adanya mitra dari masyarakat sipil. Hal ini mengilhami para birokrat untuk mendirikan LSM, sehingga saat ini tumbuhlah LSM-LSM Birokrat.

Sangat mudah untuk mengetahui bahwa LSM tersebut adalah LSM birokrat. Lembaga tersebut selalu menyebut dirinya dengan nama LSM, contohnya LSM Melati, yang hal ini tidak biasa disebut oleh LSM yang sudah lama berdiri. YLBHI adalah sebuah yayasan, tidak pernah menggunakan nama LSM LBH.

Pada kasus KUT bukan saja LSM birokrat yang terlibat, tetapi ada juga beberapa LSM lama yang terlibat, hal ini sangat mencoreng nama LSM.

Masalah yang lain adalah bahwa di LSM belum ada mekanisme untuk membersihkan dirinya dari LSM yang birokrat atau yang kotor. LSM Birokrat ada yang didirikan oleh Camat, contohnya di daerah Garut LSM birokrat banyak menyedot dana JPS, KUT dan sebagainya, dan kadang-kadang berkantor di rumah Camatnya, atau di kantor instansi pemerintahnya sendiri. Pejabat tersebut juga tercantum di akte notaris atau mencantumkan nama istrinya. Selain para birokrat, para politisi juga mulai mendirikan LSM.

Ada dua benefit mendirikan LSM bagi birokrat atau politisi, yaitu sosial benefit, dimana para birokrat atau politisi seolah-olah mendapat dukungan dari LSM. Benefit yang kedua adalah bisnis benefit, dengan mengerjakan proyek-proyek dari lembaga dana di mana sekarang pemerinah tidak populer lagi di mata lembaga dan untuk menyalurkan dana seperti proyek kemanusiaan.

Di Philippina ada sudah ada mekanisme yang disebutkan diatas, seperti kongres LSM yang bisa menegakkan kode etik LSM, atau adanya asosiasi-asosiasi LSM tertentu.

ICW pernah mencoba membuat pertemuan nasional untuk mencoba mendiskusikan tentang kode etik "lembaga watch" di Indonesia, karena ICW merasa khawatir karena banyak mendengar bahwa sebagian lembaga-lembaga tersebut di Indonesia menjadi lembaga pemereras.

Namun diskusi ini gagal karena banyak yang tidak tertarik dengan kode etik tersebut. Padahal kode etik tersebut menjadi penting, bahkan menjadi prasyarat dari sebuah

watch dog, karena lembaga seperti ICW mudah sekali tergelincir menjadi lembaga pemerias, terutama karena ICW mempunyai data, dan dengan data tersebut bisa pemerias pejabat yang terkait. Banyak ICW-ICW palsu di daerah menjadi lembaga *watch dog* pemerias. Padahal ICW tidak mempunyai cabang di daerah.

Dengan contoh-contoh di atas, kiranya sudah sangat mendesak untuk kita berbicara mengenai akuntabilitas publik dari Ornop.

Masalah yang kedua adalah meskipun tanpa adanya wajah bopeng di mata publik seperti di atas, kiranya saat ini sudah menjadi suatu keharusan bagi LSM untuk mempunyai suatu standar baru dalam hubungannya dengan masyarakat, negara maupun dengan *private sector*.

Kalau kita bicara dalam konteks *good governance* misalnya, yang sekarang menjadi mantera baru sejak tahun 1993, hampir semua orang membicarakan *good governance* dan bahkan di pemerintah memproyekan kata itu untuk mendapatkan dana, sementara korupsi jalan terus.

Good governance adalah suatu gagasan baru untuk mengatur pola hubungan antara masyarakat, negara dan *private* sektor, di mana di dalam konsep tersebut tidak boleh ada satu aktor yang absolut, tapi harus ada dalam keadaan keseimbangan. Hal ini berbeda dengan konsep lama, di mana negara mempunyai kewenangan dan kewenangan itu tidak selalu dari atas. Selain itu ada pemaksaan seperti kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan pemerintah karena kekuasaan dari atas. Sesungguhnya konsep *good governance* bukan itu, tetapi diterimanya suatu kebijakan publik, bukan karena kekuasaan salah satu aktor namun karena keterlibatan aktor-aktor di dalam *good governance* tadi.

Saat ini tuntutan *good governance* hanya kepada pemerintah saja, begitu juga dilakukan oleh lembaga dana internasional dan Ornop, sehingga banyak dana diarahkan untuk perbaikan kelembagaan-kelembagaan di dalam pemerintah. Sesungguhnya dalam konsep *good governance* ada tiga aktor yang terlibat masyarakat sipil, pemerintah dan *private* sektor. Ornop seringkali berbicara mengenai demokratisasi, partisipasi, dan sebagainya, sementara LSM sendiri tidak demokratis bahkan sebagian besar LSM berbentuk oligarki, hanya dimiliki oleh beberapa orang dan legitimasinya bukan karena diangkat oleh masyarakat namun mengklaim atas nama masyarakat dan punya komitmen kepada masyarakat.

Kurang setuju bahwa LSM harus seperti partai politik yang mempunyai keanggotaan, atau ormas. Ada beberapa LSM yang berbentuk perkumpulan, namun selama dananya berasal dari lembaga dana tidak akan ada banyak artinya, mungkin hanya sekali setahun ada kongres dan dipilih, pemilihannya secara lebih demokratis. Sebaliknya Yayasan dipilih oleh pemilik yayasannya.

Bila LSM mengklaim keberadaan dirinya di atas kepentingan rakyat, harus ada kewajiban mengembalikan kepercayaan publik tersebut (*recovery public trust*), bukan saja mengembalikan dalam bentuk program-program LSM diorientasikan pada masyarakat, tetapi harus ada mekanisme-mekanisme di mana masyarakat dapat ikut menentukan kebijakan-kebijakan LSM termasuk mengontrol dan memonitor, dan lain sebagainya.

Tidak ada keadaan yang memaksa bahwa LSM bertanggungjawab kepada rakyat, LSM hanya akuntabel terhadap *funding* atau patronnya. Di dalam struktur LSM tidak ada keharusan untuk akuntabel kepada rakyat.

Di dalam konsep *good governance* ada interdependensi antar aktor-aktor tersebut, maka keberhasilan konsep *good governance* sangat tergantung pada *collective action*. Saat ini selain di pemerintah, justru *private sector* lebih maju, di perusahaan besar sudah mempunyai konsep *cooporate governance*. Sementara di LSM belum ada konsep semacam *cooporate governance*. Beberapa media besar seperti Kompas, Tempo sedang memikirkan bagaimana akuntabilitas dari lembaga kepada masyarakat.

Pentingnya konsep *governance* diterapkan di LSM, untuk memperkuat legitimasi LSM sendiri, efisiensi dan untuk meningkatkan keyakinan masyarakat bahwa masyarakat mendukung setiap program LSM.

LSM tidak jauh berbeda dengan Bappenas, umumnya LSM tidak pernah konsultasi dengan masyarakat, ide-ide datang bukan dari bawah atau masyarakat, kadang-kadang memberikan *external negative* yang harus ditanggung oleh masyarakat.

Sudah ada langkah-langkah oleh beberapa LSM untuk menunjukkan bahwa LSM juga bukan malaikat yang tidak tersentuh oleh hukum, seperti ada LSM perempuan yang mengadakan praperadilan sesama staf LSM yang melakukan pelacehan seksual terhadap staf perempuan LSM lainnya. Ini adalah suatu mekanisme di LSM untuk akuntabel, dan responsibel.

Kadang-kadang LSM seperti militer, selalu melindungi anggotanya yang melakukan kejahatan, karena ada ketakutan kalau aib tersebut di muka maka legitimasi LSM tersebut menjadi berkurang.

Ada beberapa pertanyaan yang dapat mengukur parameter sejauh mana kita akuntabel atau mekanisme akuntabilitas:

1. Apakah ada pelaporan kepada masyarakat mengenai informasi yang terkait dengan kinerja organisasi (keuangan, aktifitas) secara akurat, tepat waktu, jelas dan konsisten. ICW sudah memulai melaporkan hasil keuangan yang diaudit oleh akuntan publik, bisa dilihat di web site ICW;
2. Apakah ada kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi. Prinsip transparansi bukan saja hanya menyediakan laporan-laporan tersebut tetapi terbuka terhadap pengarahannya masyarakat, jadi ada kemudahan dari masyarakat untuk mengakses informasi apapun;
3. Apakah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dan audit yang lazim digunakan dan diterima luas. Saat ini audit sudah banyak dilakukan oleh LSM karena permintaan pemberi dana, namun audit permintaan rakyat belum tentu diberi;
4. Apakah ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam kesepakatan dasar organisasi. LSM yang didirikan dua atau tiga orang kadang tidak jelas pembagian kekuasaannya, sehingga *check and balance* tidak ada. Seharusnya di LSM ada pemisahan kekuasaan, terutama masalah uang,

program dan lain sebagainya. Selain itu harus ada proses regenerasi atau mekanisme pergantian pengurus;

5. Apakah ada sistem audit internal;
6. Apakah memiliki *code of conduct* dan sistim untuk menjamin pelaksanaannya, termasuk kewajiban untuk mentaati hukum. Di ICW ada beberapa pemecatan staf yang terlibat menerima suap;
7. Apakah ada sistem untuk menegakkan kejujuran (integritas), disiplin, sanksi dan sistim penilai kinerja personal. Banyak LSM yang mengklaim untuk kepentingan rakyat namun tidak mempunyai jam kantor yang jelas, tidak ada jadwal waktu, tidak ada ukuran keberhasilan dan tidak mempunyai sistim penilai kinerja personal;
8. Apakah menghormati hak-hak buruh, dan menerapkan keadilan jender;
9. Apakah ada SOP dalam rekrutmen pegawai dan pengadaan barang dan jasa yang bebas KKN;
10. Apakah ada SOP pencari dana yang menjamin kemandirian organisasi dalam hubungannya dengan pemerintah dan sektor swasta dan bebas KKN. ICW mempunyai peraturan tidak boleh menerima dana dari pihak yang mempunyai konflik interest dengan kegiatan ICW. ICW tidak boleh menerima dana dari Bank Dunia karena Bank Dunia bagian dari lembaga yang dimonitor oleh ICW. Sebenarnya kalau kita mau dipaksa untuk akuntabel kepada rakyat, dana-dana LSM seharusnya juga merupakan representasi masyarakat, didanai dari masyarakat. ICW sedang merencanakan *fund raising*, bagaimana publik membiayai ICW. Orang yang memberi dana kepada ICW harus masuk ke rekening dan si pengirim harus tidak bernama, selain itu jumlah dananya dibatasi;
11. Apakah ada mekanisme untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan program, dan evaluasi kinerja organisasi. ICW sampai saat ini belum mempunyai mekanisme itu karena ICW belum jelas konsituennya. Di dalam struktur ICW masih di bawah yayasan, namun anggota Badan Pendiri ada 7 orang dan di Dewan Etik ada 15 orang yang terdiri dari 7 orang minoritas dari badan pendiri dan 8 orang lainnya dari masyarakat yang duduk mengawasi lembaga; dan
12. Apakah ada mekanisme untuk menerima dan menyelesaikan keluhan-keluhan masyarakat yang diakibatkan tentang program LSM.

DISKUSI

TERMIN I:

1. Galuh, PERSEPSI Klaten

- Apakah perlu lembaga *watch* untuk LSM?

Jawab:

- Tidak perlu lembaga yang mengawasi LSM, yang harus mengawasi LSM adalah konsituen atau masyarakat sekitarnya, contoh masyarakat sekitar diminta mengevaluasi LSM setiap akhir tahun. Selain itu media massa yang kritis dapat juga sebagai pengawas LSM. Diperlukan juga forum-forum LSM sejenis yang dapat dipakai sebagai suatu instrumen untuk menegakkan kode etik. Harus ada keberanian mengadakan pengucilan LSM yang melanggar kode etik.
- Integritas individu LSM sangat penting, namun bila tidak ada sistim yang mengatur, maka individu LSM tidak akan bertahan dengan integritasnya.

2. Anhar, FITRA Jakarta

- Akuntabilitas itu bukan hanya masalah dana, namun ada akuntabilitas program/kegiatan, akuntabilitas strategi atau caranya, akuntabilitas personil.
- Tidak semua LSM harus bertanggungjawab keuangan kepada masyarakat bila dia mendapat dana dari lembaga dana, namun harus bertanggungjawab mengenai program kepada masyarakat.
- Bagaimana hubungan antara Ornop dengan pemerintah agar Ornop dianggap oleh pemerintah sebagai musuh atau sebaliknya?

Jawab:

- Setuju dengan adanya akuntabilitas dana, program, strategi dan personil.
- Semua dana, baik dana *loan* maupun hibah, harus terbuka dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- Ornop boleh saja bekerjasama dengan pemerintah tetapi independensi Ornop harus tetap ada.

3. Yani, Rumput Cut Nyak Dien Yogyakarta

- Sejauh mana suatu organisasi dapat menerima diktator mayoritas (masyarakat)? Karena diktator mayoritas bisa menggrogoti lembaga.
- Sejauh mana publik dapat mengakuntansi publik?

Jawab:

- Perlu adanya transparansi sehingga masyarakat mau diajak bicara dan mengerti.

4. Yori, *Parlement Watch* Indonesia

- Ada *statement* bahwa LSM tidak perlu mempertanggungjawabkan dana *grant*, cukup mempertanggungjawabkan dana *loan*, padahal banyak penyimpangan pada dana *grant*. Bagaimana menyikapi hal tersebut?
- Organisasi LSM advokasi rawan dengan *vested-interest*, LSM advokasi cenderung bersikap sentralistik pada proses *good governance*, hal ini menumbuhkan kebencian masyarakat terhadap pemerintah dan sebaliknya ketika Ornop tidak akuntabel akan sama-sama tidak dipercaya oleh masyarakat dalam proses *good governance*.
- Masalah penyumbang anonim tidak setuju, jika kita sudah merencanakan bahwa kita harus terbuka terhadap publik, siapapun yang menyumbang harus dicantumkan, tidak perlu anonim.
- Sejauh mana daya tahan LSM ketika sedang membuat proses akuntabilitas yang dapat dipertanggung jawabkan.

Jawab:

- Dana dari manapun harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- Masalah anonim masih perlu didiskusikan, ICW hanya ingin mengantisipasi penyumbang yang ingin mempengaruhi ICW, dan bukan hanya anonim saja tapi juga ada pembatasan jumlah dan harus terbuka untuk diumumkan.

TERMIN II:

1. Johny Simanjuntak, ATMA Solo

- Mengapa ICW di demo?
- Mengapa Kontras di demo?
- Jika dana kegiatan Ornop dibuka kepada publik, bagaimana bila masyarakat mengatakan bahwa Ornop menjual masyarakat?

Jawab:

- Tidak semua informasi harus dibuka, ada pembagian wewenang, pekerjaan, agar ada *check and balance* atau saling kontrol. Wewenang yang satu dengan yang lain tidak boleh saling intervensi, namun banyak orang tidak mau ada pembagian wewenang, semua dibicarakan sama-sama. Hal ini pun tidak efisien dalam manajemen sebuah organisasi.
- Problem yang sama terjadi di Kontras. Di LSM belum ada mekanisme untuk menyelesaikan konflik. Di LSM bila ada perbedaan akan terjadi perpecahan.
- Tanpa dibukapun masyarakat sudah mencurigai LSM mempunyai banyak uang. Kita tidak perlu takut dicurigai oleh masyarakat selama kita sudah

melakukan akuntabilitas dengan baik. Kita tidak bisa memuaskan seluruh masyarakat.

2. I. Made Samiyana, PERCIK Salatiga

- Mendukung ide *code of conduct*, itu menunjukkan *performance* sebuah LSM, dengan adanya kode etik Ornop merupakan petunjuk bagi masyarakat untuk mengetahui apakah Ornop melakukan penyimpangan atau tidak.
- ICW terlalu mendiskreditkan pengusaha, apakah kita bisa mengajak pengusaha untuk berfikir bersama agar menjadi baik menurut ukuran universal, apakah kita harus menolak niat baik untuk berpartisipasi dari kelompok pengusaha?

Jawab:

- Banyak orang belum berfikir tentang ide kode etik Ornop. Kadang-kadang LSM hanya jujur pada apa yang dikerjakannya sendiri. Contoh, dia hanya respek kepada hak-hak buruh karena dia bekerja untuk pengorganisasian hak-hak buruh, tetapi dia tidak respek kepada kerusakan lingkungan, korupsi atau keadilan gender.
- Tidak ada konglomerat yang tidak busuk, tetapi tidak berarti ICW antipati kepada pengusaha. Contoh, ketika ICW mengangkat kasus Texmaco, ICW bekerja sama dengan asosiasi tekstil, sepatu, garmen dimana asosiasi-asosiasi tersebut tidak mendapat kredit *pre-shipment* karena diambil alih oleh lima konglomerat besar, yang seharusnya ratusan pengusaha mendapat suntikan dana tersebut.
- Belum ada kesadaran masyarakat kepada niat baik pengusaha, contohnya masyarakat belum menerima pengusahaan yang berniat untuk membantu LSM di dalam pemberantasan korupsi.

3. Ali, FPKP Jogjakarta

- Legitimasi Ornop terletak pada masyarakat. Masyarakat yang mana?
- Seharusnya Ornop mengembalikan *recovery publik trust*, dengan apa kalangan ornop dapat mengembalikan *recovery public trust* tersebut?

Jawab:

- Tergantung dari LSMnya, bila LSM tersebut bergerak di petani, legitimasinya dari masyarakat petani. ICW sendiri agak sulit karena konstituennya tidak jelas, ICW tidak perlu mencari konstituen, gerakan sosialnya adalah bagaimana memasukan agenda anti korupsi di semua lapisan masyarakat.
- Ornop harus menghitung dana programnya secara proporsional, biaya operasional program seharusnya lebih kecil dari biaya yang dikembalikan kepada masyarakat.

4. Arif Rahadi, Mitra Swadaya, Cirebon

- LSM pandai membuat program dengan atau tanpa masyarakat, namun belum ada indikator bagaimana program bermanfaat bagi masyarakat, belum ada mekanisme masyarakat menilai program ini bermanfaat bagi masyarakat.
- Setuju dengan terbentuknya kode etik, karena saat ini disinyalir banyak LSM yang harus memberi manajemen *fee* kepada pemerintah ketika menjalankan program dari pemerintah, hal ini akan berdampak menurunnya pelayanan kepada masyarakat

Jawab:

- Bagaimana masyarakat melihat benefit dari program LSM, harus ada instrumen yang dibuat LSM agar masyarakat bisa mengevaluasi program LSM. Evaluasi lembaga dana hanya terbatas pada laporan keuangan dan laporan kegiatan.

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM NEGARA DEMOKRATIS MODERN

Oleh:

Hendardi

Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI)

Setelah runtuhnya rejim Orde Baru, kosa kata transparansi dan akuntabilitas publik dalam arti sesungguhnya mulai dikenal dalam sistem kenegaraan kita. Masyarakat mulai turut aktif mengontrol pejabat penyelenggara negara. Tuntutan terhadap terciptanya *clean governance*, dengan program pemberantasan korupsi di tubuh birokrasi menjadi tema sentralnya. Tentu saja kontrol publik terhadap negara menjadi mungkin, akibat dari perjuangan reformasi yang membuka ruang kekuasaan negara untuk dapat diakses oleh masyarakat. Sesuatu yang mewah dan sulit dapat terjadi di era rejim otoritarian Orde Baru.

KONSEP NEGARA DEMOKRATIS MODERN

Dalam paham negara demokratis modern, kontrol rakyat terhadap penyelenggara negara merupakan terjemahan yang sempurna dari asas kedaulatan rakyat. Pada awalnya kontrol rakyat terhadap penyelenggara negara “diejawantahkan” di dalam model demokrasi representatif semata. Namun dalam perkembangannya demokrasi representatif dapat terjerumus ke dalam pemerintahan elitarisme, di mana keputusan-keputusan penting hanya diambil oleh segelintir orang saja. Oleh karenanya, sangat rawan terhadap praktek-praktek penyelewengan kekuasaan.

Untuk itu kontrol rakyat terhadap penyelenggara negara harus dapat bersifat langsung dan nyata. Kontrol rakyat terhadap penguasa hanya dapat berjalan efektif, bila penyelenggara negara dapat memaparkan program dan kebijakannya secara transparan. Dengan demikian rakyat dapat secara nyata menuntut pertanggung jawaban (akuntabilitas publik) terhadap penyelenggara negara. Lewat pemberitaan *pers* yang bebas dan pembentukan opini publik, penyelenggara negara tidak dapat mengelak dari tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik.

Tekanan lewat pendapat umum dampaknya sering sangat luar biasa. Pemerintah tidak dapat bertindak seolah-olah bahwa rakyat tidak ada (kasus pengunduran diri sementara Jaksa Agung Andi Galib, merupakan contoh dari dahsyat opini publik). Memang negara dapat juga secara arogan melawan sebagian besar kehendak masyarakat (kasus putusan bebas Tommy Suharto dan Suharto adalah contoh arogansi penyelenggara negara), namun secara akumulatif dapat memicu rasa ketidakpuasan rakyat terhadap penguasa. Sebab tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik tidak saja merupakan fakta politik. Melainkan juga suatu tuntutan etis, karena pemerintah bertindak demi dan atas nama rakyat. Karena itu, rakyat berhak untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah.

Di pihak lain, kontrol rakyat dan demokrasi representasi terhadap penyelenggara negara tidak dapat dijadikan model tunggal bagi terciptanya pemerintahan yang transparan dan *accountable*. Harus juga dibarengi dengan reformasi hukum yang

bertujuan memaksa penyelenggara negara untuk menjalankan negara secara terbuka dan bertanggung jawab. Dengan demikian tuntutan penyelenggaraan negara yang transparan dan *accountable* tidak merupakan tuntutan politis semata, tetapi juga ditagih pertanggung-jawabannya secara hukum. Contoh yang tepat menggambarkan kewajiban hukum atas perlunya keterbukaan dan tanggung jawab ini ialah kewajiban bagi pejabat negara untuk menyerahkan daftar kekayaannya sebelum dan sesudah masa jabatan berakhir. Menuntut kesungguhan komitmen dan dedikasi dari aparat penegak hukum merupakan hasil yang juga ingin dicapai lewat reformasi hukum

TANTANGAN TRANSISI POLITIK

Proses reformasi yang bergulir dan dipelopori oleh gerakan mahasiswa baru hanya berhasil menjatuhkan rejim otoritarian Orde Baru. Transformasi nilai-nilai baru sebagai akar dari suatu proses perubahan fundamental menuju megara demokratis justru tidak sepenuhnya terjadi. Apa yang sesungguhnya terjadi di tahun 1998, tuntutan reformasi telah berhasil dibelokkan oleh kekuatan *status quo* yang seolah-olah hanya menjadi soal pergantian penguasaan politik belaka. Terbukti kemudian, penyelewengan kekuasaan yang tampaknya di era reformasi tidak kalah dahsyatnya dengan apa yang terjadi di jaman Orde Baru. Kasus Bank Bali dan *non-budgeter* Bulog yang melibatkan ketua Akbar Tanjung ditengah-tengah euforia reformasi.

Pada titik ini, terus berlanjutnya praktek-praktek penyelewengan kekuasaan gaya Orde Baru menunjukkan demokrasi yang kita cita-citakan belum mampu memaksakan perubahan perilaku penyelenggara negara. Sejatinya, reformasi harus melahirkan transformasi nilai-nilai baru yang membawa perubahan perilaku dari penyelenggara negara. Tidak terjadinya transformasi nilai menunjukkan pada kita bahwa transformasi tidaklah berubah apa-apa selain suksesi kepemimpinan nasional. Hal lain yang harus dicermati ialah kegagalan melakukan transformasi nilai di dalam gerakan reformasi, semata-mata bukan karena ketidakmampuan kita dalam mengelola suatu perubahan, tetapi ditentukan juga oleh resistensi kekuatan *status quo* dan ketidaktegasan kita dalam menghadapinya.

Terbuka akses bagi rakyat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara, tidak serta-merta berimplikasi terhadap perubahan perilaku aparat penyelenggara negara. Institusionalisasi politik yang diharapkan mampu menjadi pengat dari kontrol rakyat terhadap penyelenggara negara gagal menjalankan fungsinya. Demokrasi representasi yang menjelma kedalam lembaga perwakilan rakyat kita justru mengalami degradasi. Dimana lembaga perwakilan rakyat kita, disinyalir menjadi sarang dari korupsi atau penyelewengan kekuasaan. Namun naasnya, sistem kenegaraan kita tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat mengontrol wakilnya di parlemen, karena kontrol terhadap wakil rakyat sepenuh-penuhnya diseerahkan pada mekanisme hukum formal. Celakanya lagi, hukum formal kita merupakan bagian yang tak terselesaikan hingga kini untuk direformasi.

Dalam masa transisi politik, keberhasilan demokratisasi yang ditandai dengan adanya proses kenegaraan yang transparan dan *accountable*, sangat bergantung dengan kegiatan partai politik. Karena partai politik merupakan organ terpenting dalam proses pembentukan masyarakat sipil yang demokratis. Oleh karena itu, moral politik dalam kehidupan bernegara harus menjadi perhatian besar bagi para partai politik.

Dengan demikian partai politik bertanggung-jawab atas kepercayaan masyarakat terhadap terciptanya *clean governance*. Di sini rakyat harus merupakan bagian integral dari proses kontrol terhadap penyelenggara negara.

Sesungguhnya banyak harapan serta tuntutan yang harus ditumpahkan dari peran partai politik ke depan, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama pada masa lalu. Dalam proses pencalonan wakil rakyat di parlemen, pertama-tama harus bertindak hati-hati dalam mempresentasikan calon-calon wakil yang mampu memenuhi tuntutan dan kepentingan masyarakat. Hal ini berarti calon-calon itu harus sesuai dengan konsep-konsep moral dan etika masyarakat. Pada pemilu 1999 yang terjadi justru sebaliknya, pemilu dijadikan pintu masuk untuk mendapatkan legitimasi baru bagi para anasir Orde Baru guna masuk kembali ke kancah politik lewat parlemen. Bukan hanya itu, orang-orang yang diindikasikan mempunyai masalah korupsi di rejim Soeharto dapat melenggang dengan tenang turut serta pada proses penyelenggaraan negara.

Dari konfigurasi wakil rakyat yang dipilih lewat partai dengan kualifikasi yang tidak jelas, mustahil harapan terhadap terciptanya *clean governance* dapat diwujudkan. Karena bagaimanapun transparansi dan akuntabilitas dapat berjalan dengan baik, dengan mengandaikan kontrol efektif dari parlemen kita. Sedangkan parlemen kita sekarang, justru merupakan elemen negara yang pertama dan utama harus dikontrol. Tak ada jalan pintas yang dapat kita lakukan bila fungsi-fungsi kenegaraan kita tak satu pun dapat berjalan dengan layaknya suatu lembaga demokrasi representasi. Senjata yang sekarang secara efektif yang dapat digunakan oleh rakyat untuk menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas masih terbatas pada kebebasan *pers* dan kebebasan mengemukakan pendapat. Suatu wahana yang tidak memadai bila kita membayangkan adanya kontrol efektif untuk menuntut adanya keterbukaan dan tanggung-jawab publik terhadap proses penyelenggaraan negara. Sayangnya, hanya itulah yang realistis yang tersedia bagi rakyat.

NOTULEN

Pembicara	Hendardi
Moderator	Imam Prakoso

Pemaparan Hendardi:

Akuntabilitas publik perspektifnya menuju ke arah politik, kekuatan-kekuatan politik itu kemudian mewujudkan dalam bentuk legal, dalam bentuk peraturan-peraturan hukum.

Setelah Orde Baru berkuasa, runtuh dan selesai, kosa kata transparansi, dan akuntabilitas publik di dalam arti yang sesungguhnya mulai dikenal di dalam sistem kenegaraan kita. Masyarakat mulai aktif mengontrol pejabat penyelenggara negara. Tuntutan terhadap terciptanya *clean governance* dan pemberantasan korupsi misalnya, di tubuh birokrasi telah menjadi tema sentral, dan telah menjadi wacana.

Kontrol publik terhadap negara menjadi mungkin karena adanya perjuangan reformasi tahun 1998 yang membuka ruang kekuasaan negara untuk dapat diakses oleh masyarakat. Sesuatu yang mewah pada masa Orde Baru dan sangat sulit didapatkan.

Di dalam paham negara demokrasi modern, kontrol rakyat terhadap penyelenggara negara merupakan terjemahan yang sempurna dari asas kedaulatan rakyat. Pada awalnya kontrol rakyat pada negara ini diwujudkan dalam model demokrasi representatif semata, namun di dalam perkembangannya demokrasi representatif dapat terjerumus ke dalam pemerintahan elitisme, di mana keputusan-keputusan penting hanya dilakukan oleh sekelompok orang saja. Ini sangat rawan terhadap praktek-praktek penyelewengan kekuasaan itu sendiri.

Untuk itu, kontrol rakyat terhadap penyelenggara negara harus dapat bersifat langsung dan nyata. Kontrol rakyat terhadap penguasa hanya dapat berjalan efektif bila penyelenggara negara tidak dapat memaparkan program dan kebijakannya secara transparan, dengan demikian rakyat dapat secara nyata menuntut pertanggungjawaban atau akuntabilitas publik terhadap penyelenggara negara, misalnya melalui pemberitaan pers yang bebas dan pembentukan opini publik. Penyelenggara negara tidak dapat mengelak dari tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik.

Tekanan melalui pendapat umum atau pembentukan opini publik, dampaknya seringkali luar biasa, seperti contohnya ketika Jaksa Agung Andi Galib harus mengundurkan diri dari jabatannya karena tekanan publik. Pemerintah tidak dapat bertindak seolah-olah bahwa rakyat itu tidak ada, contoh kasus ini memberi gambaran betapa dahsyatnya tekanan publik. Sesungguhnya penyelenggara negara dapat saja secara arogan melawan sebagian besar kehendak masyarakat, misalnya kasus Tommy Suharto atau kasus pengadilan Suharto, itu adalah contoh arogansi penyelenggara negara. Tetapi secara akumulatif hal ini dapat memicu ketidakpuasan rakyat terhadap penguasa, sebab tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik bukan hanya suatu fakta politik tetapi juga suatu tuntutan etis,

karena bertindak demi dan atas nama rakyat, karena itu rakyat berhak mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah.

Di pihak lain kontrol rakyat dan demokrasi representasi terhadap penyelenggaraan negara tidak dapat dijadikan model tunggal bagi terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Harus juga disertai dengan reformasi hukum yang bertujuan memaksa penyelenggara negara untuk menjalankan negara secara terbuka dan bertanggung jawab. Dengan demikian tuntutan penyelenggaraan negara yang tidak transparan dan akuntabel, tidak merupakan tuntutan politis semata, tetapi juga dituntut pertanggung jawabannya secara hukum. Contoh, kewajiban meyerahkan daftar kekayaan pejabat negara sebelum dan sesudah masa jabatannya. Juga seharusnya disertai dengan mekanisme investigasi atas kekayaan tersebut.

Menuntut kesungguhan komitmen dan dedikasi dari aparat penegak hukum, ini merupakan hasil yang juga ingin dicapai melalui reformasi hukum. Proses reformasi yang bergulir dan dipelopori oleh gerakan mahasiswa sebetulnya hanya berhasil menjatuhkan rezim Orde Baru. Transformasi nilai-nilai baru sebagai akar dari suatu proses perubahan fundamental menuju negara demokratis sesungguhnya tidak terjadi.

Sesungguhnya yang terjadi pada tahun 1998 adalah tuntutan reformasi telah berhasil dibelokan oleh kekuatan status quo yang seolah-olah hanya menjadi soal pergantian kekuasaan belaka atau pergantian penguasa politik. Hal ini terbukti bahwa penyelewengan kekuasaan yang terlihat masa sekarang tidak kalah dahsyatnya dengan masa orde baru. Contoh, kasus Bank Bali atau kasus Dana Non Budgeter Bulog yang melibatkan ketua DPR Akbar Tanjung, justru terjadi di tengah-tengah euforia reformasi.

Praktek-praktek penyelewengan gaya Orde Baru semacam ini terus berlanjut hingga kini, hal ini menunjukkan bahwa demokrasi yang kita cita-citakan belum mampu memaksa perubahan perilaku di penyelenggara negara. Seharusnya reformasi harus melahirkan transformasi nilai-nilai baru yang membawa perubahan perilaku dari penyelenggara negara. Tidak terjadinya transformasi nilai ini menunjukkan bahwa transformasi hanya merubah suksesi kepemimpinan nasional.

Hal lain yang harus dicermati adalah kegagalan melakukan transformasi nilai di dalam gerakan reformasi. Hal ini semata-mata bukan karena ketidakmampuan kita di dalam mengelola suatu perubahan, tetapi juga ditentukan oleh resistensi kekuatan status quo dan ketidaktegasan kita di dalam menghadapinya.

Terbukanya akses bagi rakyat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggara negara pada saat sekarang, tidak serta-merta berimplikasi terhadap perubahan perilaku aparat penyelenggara negara. Institusionalisasi politik yang diharapkan mampu menjadi penguat dari kontrol rakyat terhadap penyelenggara negara telah gagal menjalankan fungsinya. Demokrasi representasi yang menjelma ke dalam lembaga perwakilan rakyat, justru mengalami degradasi. Lembaga dewan perwakilan rakyat kita disinyalir menjadi sarang korupsi atau penyelewengan kekuasaan. Sayangnya sistem kenegaraan kita tidak memberikan ruang bagi rakyat untuk dapat mengontrol wakil rakyat, karena kontrol terhadap wakil rakyat sepenuhnya diberikan kepada mekanisme hukum formal. Namun hukum formal di Indonesia merupakan bagian yang tidak terselesaikan untuk direformasi sampai saat ini.

Dalam masa transisi politik, keberhasilan demokratisasi yang ditandai dengan adanya proses kenegaraan yang transparan dan akuntabel sangat tergantung dengan kegiatan partai politik. Partai politik merupakan organ terpenting di dalam proses pembentukan masyarakat sipil yang demokratis. Oleh karena itu moral politik di dalam kehidupan bernegara harus menjadi perhatian yang besar bagi partai politik. Partai politik harus bertanggung jawab atas kepercayaan masyarakat terhadap terciptanya *clean governance*. Di sini rakyat harus merupakan bagian integral dari proses kontrol terhadap penyelenggaraan negara.

Sayangnya kita hanya mempunyai pengalaman menyelenggarakan partai politik tidak banyak, selama ini kita hanya mempunyai pengalaman dengan 3 partai politik, sehingga orang yang membentuk partai baru tidak dapat menjalankan fungsi partainya secara sesungguhnya.

Sesungguhnya banyak harapan dan tuntutan kepada peran partai politik ke depan agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu, terutama dalam proses pencalonan wakil rakyat di parlemen. Yang pertama, harus hati-hati di dalam merepresentasikan calon-calon wakil yang mampu memenuhi tuntutan dan kepentingan masyarakat. Calon-calon tersebut harus sesuai dengan konsep moral dan etika masyarakat. Pada pemilu tahun 1999 yang terjadi justru sebaliknya, pemilu dijadikan pintu masuk untuk mendapatkan legitimasi baru bagi para anasir Orde Baru untuk masuk kembali ke dalam kancah politik formal melalui parlemen. Orang yang diindikasikan mempunyai masalah korupsi di zaman Orde Baru, dapat dengan tenang turut serta di dalam proses penyelenggaraan negara.

Dari konfigurasi wakil rakyat yang dipilih oleh partai dengan kualifikasi yang tidak jelas, mustahil harapan akan terciptanya *clean governance*. Transparansi dan akuntabilitas akan berjalan dengan baik bila ada kontrol yang efektif terhadap parlemen. Parlemen kita merupakan elemen negara yang pertama dan utama yang harus dikontrol. Tidak ada jalan pintas yang bisa dilakukan bila fungsi kenegaraan kita tidak satu pun dapat berjalan dengan layaknya suatu lembaga demokrasi representasi. Senjata sekarang yang secara efektif dapat digunakan oleh rakyat untuk menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas masih terbatas pada kebebasan pers dan kebebasan mengemukakan pendapat, hal ini belum cukup. Sayangnya hanya inilah yang kita punya.

DISKUSI

TERMIN I:

1. Eko Sulistyono, Gita Pertiwi Solo

- Setelah reformasi kalangan LSM mengalami kemunduran di dalam sisi akuntabilitas, Ornop sering mengkritik penyelenggara negara harus transparan dan akuntabel, namun dirinya sendiri tidak pernah transparan dan akuntabel.
- Bagaimana menciptakan mekanisme kontrol publik yang dilembagakan.

Jawab:

- Lebih setuju bila LSM dapat membenahi organisasinya sendiri dengan mekanisme kontrol yang bisa mencerminkan adanya transparansi. PBHI mencoba membentuk organisasi LSM dengan bentuk perkumpulan agar lebih demokratis karena mempunyai anggota yang dapat melakukan kontrol atau akuntabilitas terhadap kegiatan lembaga.
- Dengan situasi seperti ini, demokrasi ekstra parlementer menjadi suatu tuntutan utama kalau hal-hal yang lain tidak bisa diharapkan. Dengan mewujudkan desakan-desakan yang dilakukan Ornop, misalnya isu-isu komisi institusi, pemilihan presiden secara langsung meskipun kekuatannya masih lemah.

2. Wisnu, LESPI Semarang

- Pada masa Orde Baru musuh pers hanya satu, yaitu pemerintah, namun pada masa reformasi musuh pers bukan hanya pemerintah, tetapi rakyat dan juga dari kalangan pers sendiri ikut memusuhi pers.

3. Yori, *Parlemen Watch* Indonesia Yogyakarta

- Masih ada dikotomi kuat bahwa LSM tidak bisa masuk dalam proporsi sistem partai, karena ada kecurigaan bila masuk sistem partai akan menjadi partisan. Di Indonesia tidak terjadi konsolidasi demokrasi, tetapi perpecahan demokrasi.
- Kontrol publik di Indonesia hanya berupa formalitas.
- Bagaimana peran LSM untuk memelopori proses akuntabilitas dan sekaligus harus membuat kontrol publik bagi dirinya sendiri?

Jawab:

- Terjadi penyimpangan jawaban, pertanyaan diabaikan.

TERMIN II:

1. Denny, LIMPAD Semarang

- Bila masyarakat merasa dirugikan akibat dari kegiatan LSM, kemana harus menuntut, ke PTUN, peradilan pidana atau peradilan perdata?

Jawab:

- Masyarakat bisa menggugat melalui peradilan pidana atau perdata.

2. Ismail Nachom, Spektra Surabaya

- Pertanyaan ditujukan pada John Maxwell. Menurut Ismail, LSM adalah organisasi yang tidak akuntabel. Untuk pengalaman di negara barat,

bagaimana eksistensi kelembagaan Ornop berkaitan dengan pertanggung jawaban publiknya?

Jawab:

- Di negara Australia, LSM mempunyai akuntabilitas kepada lembaga dana dan kepada publik, karena kalau tidak akan jatuh reputasinya. Sistem hukumnya lebih jelas dibanding dengan di Indonesia. Organisasi-organisasi baik pemerintah maupun non-pemerintah yang melanggar undang-undang dapat dituntut dan hal ini seringkali terjadi di sana.

3. Sumardi, LPM Soegija Pranata Semarang

- Di luar negeri pemilu hanya diikuti oleh sekitar 51% atau 59%, selebihnya tidak ikut memilih aspirasinya melalui partai, namun punya jalur sendiri dan dapat menembus pada keputusan lembaga tertinggi. Di Indonesia yang mengikuti pemilu kira-kira 90% tetapi tidak semua aspirasi tersalurkan, ini menunjukkan bahwa akuntabilitas belum ada mekanismenya. Para LSM pun belum mempunyai mekanisme untuk menyampaikan aspirasinya. Bagaimana supaya LSM bisa akuntabel?
- Mungkinkah LSM-LSM dapat mempunyai akuntabilitas sehingga aspirasinya dapat menembus jalur-jalur yang formal?

Jawab:

- Pada situasi seperti saat ini, tidak berani menjamin bahwa LSM mempunyai akuntabilitas.

TERMIN III:

1. Nazir, Asosiasi Pendamping Masyarakat Yogyakarta

- Minta dikoreksi, apakah benar yang menyebut kata LSM pada undang-undang di Indonesia hanya pada Undang-Undang Lingkungan Hidup yang diperbaharui? Jadi nama LSM adalah pemberian nama yang diberikan pemerintah kepada lembaga yang dibentuk oleh masyarakat?
- Ada sekelompok pemuda mendirikan organisasi Karang Taruna, mereka bersama-sama masyarakat membuat dan menjalankan program. Semua yang telah mereka lakukan telah dipertanggungjawabkan. Menurut mereka sebagai Ornop telah melakukan akuntabilitas kepada kelompoknya. Jadi sesungguhnya sudah ada akuntabilitas publik dari Ornop.
- Adakah kesepakatan kita untuk membuat mempertanggungjawabkan kepada publik? Kasus di Jogja, program yang diberikan oleh lembaga dana baik langsung kepada rakyat maupun melalui pemerintah dulu, pada akhirnya dana akan dihibahkan kepada masyarakat. Bagaimana mempertanggungjawabkan dana-dana tersebut kepada masyarakat, karena masyarakatnya bukan hanya satu kelompok masyarakat namun seluruh masyarakat. Akhirnya di Jogja

dibuat suatu model pertanggungjawaban yang disebut Pawarta atau Paguyuban Warga Yogyakarta yang anggotanya adalah LSM, Perguruan Tinggi dan KSM yang ada di Yogya. Sehingga bila ada Ornop yang melakukan kegiatan atas nama masyarakat, dia harus mempertanggungjawabkan kegiatan dalam forum Pawarta. Pertanggungjawabannya sebatas pertanggungjawaban sosial.

- Kalau aspek legal dari Ornop belum jelas, maka *rule of the game* yang akan dibuat oleh Ornop juga akan menjadi masalah. Inilah yang harus kita kerjakan.

Jawab:

- Istilah LSM memang hanya ada di UU Lingkungan Hidup yang diperbaharui.
- Akuntabilitas bisa dimulai dari lembaga sendiri. Contoh, PBHI mencoba menarik kontrol publik dengan menyeimbangkan dana yang diterima. 70% dari aset yang ada adalah dari iuran anggota dan sumbangan masyarakat yang simpati, 30% dana dari luar. Ada kebijakan di PBHI bahwa dana dari luar negeri tidak boleh dari 50%, dan diusahakan dana luar negeri semakin berkurang, sehingga pertanggungjawaban PBHI lebih banyak kepada publik.
- Kita juga memotivasi masyarakat bahwa bila masyarakat memerlukan gerakan yang dimotori Ornop, masyarakat juga harus mau membayar Ornop sehingga Ornop bisa mempertanggung jawabkan kegiatannya kepada masyarakat.

2. Deni, IDEA Yogyakarta

- Ornop dan LSM berbeda. Ornop adalah organisasi non-pemerintah yang jelas sumber dananya bukan dari pemerintah yang berfungsi mengkritik dan penyeimbang negara. Setelah reformasi terjadi pengangguran yang tinggi termasuk pada penganggur terdidik. Penganggur-penganggur tersebut tidak bisa masuk ke *private* sektor, pemerintah, dan malu untuk masuk ke sektor informal sehingga sektor yang paling mudah dimasuki adalah mendirikan LSM untuk mendapatkan proyek. LSM adalah nama pelabelan dari pemerintah kepada organisasi yang terjadi karena masalah *surplus* tenaga kerja di Indonesia. LSM yang lahir sesudah Orde Baru adalah organisasi bermotif proyek.

3. Wilopo, P3MM Malang

- Akuntabilitas publik adalah sesuatu yang sulit, karena secara kultur kita tidak memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol kepada siapa pun. Di masa mendatang bila kita akan merancang program harus menyediakan ruang untuk adanya akuntabilitas publik dan hal itu didanai sendiri dan sifatnya terbuka.

KOMENTAR PESERTA WORKSHOP AKUNTABILITAS PUBLIK DAN ORNOP: ISU DAN IMPLEMENTASINYA

TENTANG MATERI DAN PENYELENGGARAAN LOKAKARYA:

1. Waktu, tempat, dan forum kurang efektif dimanfaatkan.
2. Forum terlalu besar.
3. Fasilitator/moderator belum berperan maksimal.
4. Kontribusi peserta kurang karena pemahaman tujuan lokakarya yang kurang.
5. Metodologi kurang tajam dan pembicara sedikit.
6. Jika ada lokakarya lanjutan:
 - a) peserta yang diundang harus lebih representatif dan banyak;
 - b) materi lebih mendalam tentang gagasan, kriteria, dan metode untuk membuat ornop menjadi *accountable*;
 - c) materi tiap pembicara harus bersinergi; dan
 - d) biarkan peserta yang aktif berbicara.

TENTANG PERMINTAAN PESERTA KEPADA SMERU:

1. Nama peserta dan kegiatan ornopnya agar disebarkan ke seluruh peserta dan tetap berkomunikasi.
2. SMERU diminta membagi pengalaman dalam melakukan penelitian JPS, kebijakan publik, otonomi daerah, dan lain-lain, termasuk temuan-temuan tentang persepsi akuntabilitas publik.
3. Laporan hasil lokakarya dan temuan-temuan agar disebarkan ke seluruh peserta.

IDE DAN MASUKAN DARI PESERTA:

1. Perspektif tentang akuntabilitas perlu disamakan.
2. Akuntabilitas berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan ornop dan organisasi masyarakat harus dilibatkan.
3. Diperlukan rumusan yang jelas tentang Ornop, serta penting dan wajibnya akuntabilitas publik bagi Ornop.
4. Sebaiknya dibuat forum untuk merumuskan langkah teknis untuk membuat Ornop menjadi *accountable*.
5. Sebaiknya disusun kode etik Ornop.
6. Sebaiknya dibuat lembaga kontrol untuk mengontrol Ornop-ornop.

7. Akuntabilitas harus didukung: a) Ornop tersebut; b) konstituennya; c) kemauan semua pihak (moral).
8. SMERU menjadi fasilitator kegiatan-kegiatan lanjutan.
9. Penerapan akuntabilitas dapat dilakukan bertahap secara regional, hingga akhirnya menasional.
10. Sebaiknya dibuat peta Ornop yang objektif.
11. Konstituen perlu belajar meng”*accounting*” Ornop.

DAFTAR PESERTA WORKSHOP

"Akuntabilitas Publik dan Ornop: Isu dan Prakteknya"

Rabu, 14 November 2001

Hotel Saphir, Yogyakarta

No	Nama LSM	Contact Person	Alamat	Ph	Fax	
	JAKARTA					
1	Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran	FITRA	Syafrudin Anhar	Jl. Rawajati Timur V/13, Kalibata, Jakarta	021-7983871	
2	Bina Sumberdaya Mitra	BISMI	Endang Hastuti Johan	Jl. Margonda Raya No.492B, Depok	021-7863636	021-7863737
3	Bangun Mitra Sejati	BMS	Suyatno	Jl. H. Baping Raya No.9 Rt010/07 Kel. Susukan Ciracas, Jkt 13750	021-8410905 021-84108888	021-8401920
4	Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia	PBHI	Hendardi	Jl. Cikini Raya no. 58 S/T, Jkt 10330	021-336516	021-3143965
5	Indonesian Corruption Watch	ICW	Teten Masduki	Jl. Tulodong Bawah no.9, JKT 12190	021-9195974	021-5736448
6	Lembaga Penelitian SMERU	SMERU	John Maxwell	Jl. Tulung Agung no.46, Jkt 10310	021-336336	021-330580
7	Lembaga Penelitian SMERU	SMERU	John Strain	Jl. Tulung Agung no.46, Jkt 10310	021-336336	021-330580
8	Lembaga Penelitian SMERU	SMERU	Hesti Marsono	Jl. Tulung Agung no.46, Jkt 10310	021-336336	021-330580
9	Lembaga Penelitian SMERU	SMERU	Hariyanti Sadaly	Jl. Tulung Agung no.46, Jkt 10310	021-336336	021-330580
10	Yayasan Tifa	Tifa	Renata	Graha Surya Internusa 3rd floor Suit 302 Jl. Rasuna Said Kav.X-O, Jakarta 12950	021-5275293	

No	Nama LSM	Contact Person	Alamat	Ph	Fax
	BANDUNG				
11	Sarasehan Warga Bandung	Sawarung	Nana Sukarna	Jl. Salam 19, Bandung 40114	022-7271746 022-7234606
	CIREBON				
12	Mitra Swadaya		R. Arief Rahadi	Jl. Rajawali Raya Blok D No.36, Cirebon 45141	0231-209954 0231-209954
	BOGOR				
13	Lembaga Alam Tropika Indonesia	LATIN	Moch. Djauhari	Jl. Sutra Gg. Parkit No. 31 Situ Gede, Bogor 16115	0251-420522, 420523 0251-420523
	KLATEN				
14	Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial	PERSEPSI	Yuni Pristiwati Jatinom	Km 3 Desa Krawen Kec. Ngawen, Klaten 57466	0272-322211 0272-322059 0272-322519, 22865
15	Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial	PERSEPSI	Galuh Adjeng	Km 3 Desa Krawen Kec. Ngawen, Klaten 57466	0272-322211 0272-322059 0272-322519, 22865
16	Yayasan Bina Swadaya Klaten	Bina Swadaya	I Made Sarka	Jl. Gondosuli No. 5, Klaten 57411	0272-327691 0272-22519
17	The Community of Self-Help Groups Forum	CSGF	Mulyadi	Perak Kota Baru No. 9, Tegalyoso, Klaten 57424	0272-25854, 327434 0272-25854
	SOLO				
18	ATMA Solo	ATMA	Johny Simanjuntak	Jl. Dr. Sutami No.88, Surakarta	0271-638307
19	Yayasan Indonesia Sejahtera - Solo	YIS - Solo	Richard Th Daniel	Jl. Tanjung 96 Rt002/005, Soropadan Kel. Karang Asem, Solo 57145	0271-718506 0271-727862
20	Lembaga Gita Pertiwi	Gita Pertiwi	Eko Sulistyono	Jl. Griyan Lama Rt01/1 No.20, Solo 57171	0271-710465 0271-718956
21	Yayasan Krida Paramita	YKP	Tumiriyanto	Jl. Samudra Pasai No.14, Combong Rt09/01 Kadipiro, Surakarta 57136	0271-717869, 718737, 0271-738639 0271-729268

No	Nama LSM	Contact Person	Alamat	Ph	Fax	
22	Yayasan Mitra Alam Surakarta	YMA	Taholi Laia	Jl. Empu Prapanca 43 Gentan, Surakarta 57194	0271-744286	
	SEMARANG					
23	LIMPAD	LIMPAD	Denny BC Hariandja	Jl. Lamongan Raya No. 4, Semarang	024-8414865	
24	LPPM UNIKA Soegiyapranata	LPPM UNIKA	Sumardi	Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang	024-8316142	024-8415429
25	Lembaga Studi Pers & Informasi	LeSPI	Wisno T. Hanggoro	Jl. Stonen Raya No. 13 Sampangan, Semarang	024-8414690	024-8414690
26	Lembaga Bantuan Hukum Semarang	LBH, Smg	T Radja M	Jl. Parang Kembang No. 14, Telogosari, Semarang	024-6710687	024-6710495
	SALATIGA					
27	Yayasan Bina Swadaya Boyolali	BS-BI	Dian Ratri	Jl. Raya Salatiga - Solo Km14 No.49 Mekarsari Kaligentong, Ampel, Boyolali 57352	0276-331279	0298-21104, 23525
28	Persemaian Cinta Kemanusiaan	Percik	I Made Samiana	Jl. Cemara Raya No. 6, Salatiga 50714	0298-321865	0298-321865
29	Yayasan Desaku Maju	YDM	Ali Taksisudin	Desa Gedangan Rw 01, Dusun Bandungan Kec. Tuntang, Salatiga 50773	0298-315242	
	NGAWI					
30	Himpunan untuk Studi dan Pengembangan Swadaya Masyarakat	HISPAM	Malik Fajar	Jl. Majapahit 48, Jogorogo, Ngawi 63262	0351-730156	0351-730222
	SURABAYA					
31	Studi Pengembangan Ekonomi Rakyat	SPEKTRA	Ismail Nachu	Jl. Kutisari IV No.36, Surabaya 80291	031-8474757	031-8495071
32	Yayasan Lembaga Widya Dharma	YLWD	Y. Syawaluyo	Jl. Dukuh Kupang Timur XII A No.86, Surabaya 60256	031-5684772	031-5684772

No	Nama LSM	Contact Person	Alamat	Ph	Fax	
33	Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil Jawa Timur	Pinbuk	M. Yusuf	Jl. Dukuh Kupang Timur XIV No. 28, Sby 60225		
	MADIUN					
34	Lembaga Kajian&Pengembangan Potensi Ummat	LKP2U	Kunto Setyono	Jl. Sadana Mulya 3B Rejo Mulya Kertoraharjo, Mdn	0351-456364	0351-456364
	MALANG					
35	Lembaga Bina Mandiri Indonesia	LBMI	Untung Sugiarti	Jl. Emas No.96-98, Malang 65122	0341-470206, 472875	
36	Lem. Pengembangan Kewirausahaan Damatia	Damatia	Endang S. Rejeki	Jl. Cakalang 117, Polowijen, Malang	0341-414398	0341-414398
37	P3MM	P3MM	Wilopo	Jl. Bungur 25, Malang 65141	0341-498180	0341-498180
	TUBAN					
38	Yayasan Bina Swagiri	YANARI	Ismail Amir	Jl. Jeruk A3-14 Perumahan Perbon Permai, Tuban	0356-323116, 324486	0356-324486
39	Konsorsium Adil dan Damai jatim	KAD-Jatim	Ach. Wazir	Jl. Jeruk A3-14 Perumahan Perbon Permai, Tuban	0356-323116, 324486	0356-324486
	YOGYAKARTA					
40	Institute of Development & Economic Analysis	IDEA	Deny P. Sambodo	Jl. Kaliurang Km 5, Gg Tejomoyo CtIII/3, Yogya	0271-583900	0274-583900
41	Catholic Relief Services - Yogyakarta	CRS	Diah Kei	Jl. Krasak Barat No. 3, Kotabaru, Yoyga 55224	0274-517062	0274-547189
42	Yayasan Tjoet Njak Dien	YTND	Siti Mulyani	Jl. Surokarsan Gg. Mangga MGII/367, Mergangsan, Yogyakarta	0274-389110	0274-389110

No	Nama LSM	Contact Person	Alamat	Ph	Fax	
43	Yayasan Tjoet Njak Dien	YTND	Suminto	Jl. Surokarsan Gg. Mangga MGII/367, Mergangsan, Yogyakarta	0274-389110	0274-389110
44	Yayasan Tjoet Njak Dien	YTND	Zainuddin	Jl. Surokarsan Gg. Mangga MGII/367, Mergangsan, Yogyakarta	0274-389110	0274-389110
45	Asosiasi Konsultan Permukiman Indonesia	AKPPI	M. Nazir	Jl. Bulaksumur A-12, Yogyakarta 55281	0274-563143	0274-563143
46	Griya Lentera-PKBI	PKBI	Nono Karsono	Jl. Tentara Rakyat Mataram, Gg Kapas Jt I/705 Yogyakarta 55231	0274-513595, 586767	0274-513566
47	Griya Lentera-PKBI	PKBI	Dwi Astuti	Jl. Tentara Rakyat Mataram, Gg Kapas Jt I/705, Yogyakarta 55231	0274-513595, 586767	0274-513566
48	Perkumpulan untuk Kajian dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	PKPEK	Rohman	Jl. Mangkuyudan no.7, Yogyakarta 55143	0274-380549	0274-380549
49	Parliament Watch Indonesia	PARWI	Nia Kurnianingtyas	Jl. Bausasran no.31, Yogyakarta	0274-510351	
50	Parliament Watch Indonesia	PARWI	Yaury	Jl. Bausasran no.31, Yogyakarta	0274-510351	
51	Parliament Watch Indonesia	PARWI	M. Maimin	Jl. Bausasran no.31, Yogyakarta	0274-510351	
52	Paguyuban Warga Yogyakarta	PAWARTA	Imam Prakoso	Jl. Ngadisuryan 26B, Yogyakarta	0274-385100	
53	Mitra Tani	Mitra Tani	Triyas Prasetyo	Jl. Minggiran Baru Mj II/956 Rt07/14, Yogya 55141	0274-371534	0274-371534
54	Forum Pemantau Kebijakan dan Pembangunan	FPPK Yogya	Ali S	Jl. Magelang 86, Yogyakarta	0274-586214	0274-586214
55	Kelompok Kerja Perempuan Agraris	KKPA	N. Widi Arimbi	Jl. Kaliurang Km 5, Gg Srikaton CtIII/3, Yogya	822745020	
56	Jaringan Daendels		Joko			
57	Dinas Kesehatan DI Yogyakarta		Sri Hartati	Jl. Kyai Mojo, Yogyakarta	0274-589828	
58	Dinas Sosial DI Yogyakarta		Sultoni	Jl. Kusuma Negara, Yogyakarta	0274-562319	

No	Nama LSM	Contact Person	Alamat	Ph	Fax
59	Bapeda Kota Yogyakarta		Kadri Renggono	Jl. Kenari 55, Yogyakarta 55165	0274-515207
60	Bernas	Bernas	Antonius Eko S	Jl. Sudirman no.52 Yogyakarta	0274-561211
61	Suara Merdeka		Gianto	Jl. Namburan Lor no.15, Yogyakarta	0274-373115
62	Sinar Pagi " Baru"	Sinar Pagi	Axo		
63	Progresif	Progresif	Abidien St		
64	Tajam Post		Rus		
65	Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Duta Wacana	UKDW	Murti Lestari	Jl. Dr.Wahidin no. 5-19 Yogyakarta	0274-563929
66	Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Duta Wacana	UKDW	Bambang Hediono	Jl. Dr.Wahidin no. 5-19 Yogyakarta	0274-563929
67	Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Duta Wacana	UKDW	Putrina Kristanti	Jl. Dr.Wahidin no. 5-19 Yogyakarta	0274-563929
68	Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Duta Wacana	UKDW	Cicik Esti	Jl. Dr.Wahidin no. 5-19 Yogyakarta	0274-563929
69	Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Duta Wacana	UKDW	Meili Gunawan	Jl. Dr.Wahidin no. 5-19 Yogyakarta	0274-563929
70	Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Duta Wacana	UKDW	Agus Susanty Gunawan	Jl. Dr.Wahidin no. 5-19 Yogyakarta	0274-563929
71	Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Duta Wacana	UKDW	Marduyo	Jl. Dr.Wahidin no. 5-19 Yogyakarta	0274-563929
72	Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Duta Wacana	UKDW	Ratih Luberty	Jl. Dr.Wahidin no. 5-19 Yogyakarta	0274-563929
73	Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Duta Wacana	UKDW	Ety Istriani	Jl. Dr.Wahidin no. 5-19 Yogyakarta	0274-563929
74	Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Duta Wacana	UKDW	Petra SM	Jl. Dr.Wahidin no. 5-19 Yogyakarta	0274-563929

No	Nama LSM		Contact Person	Alamat	Ph	Fax
75	Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Duta Wacana	UKDW	Singgih Santoso	Jl. Dr.Wahidin no. 5-19 Yogyakarta	0274-563929	
76	Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Duta Wacana	UKDW	Purnawan Hardiyono	Jl. Dr.Wahidin no. 5-19 Yogyakarta	0274-563929	
77	Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Duta Wacana	UKDW	Singgih Santosa	Jl. Dr.Wahidin no. 5-19 Yogyakarta	0274-563929	
78	Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Duta Wacana	UKDW	Melli	Jl. Dr.Wahidin no. 5-19 Yogyakarta	0274-563929	
79	Forum Cinta Bangsa		Girindra	Jl. Widoharjo no.19, Semarang	024-3558219	
	KENDARI					
80	Forum Masyarakat Sipil	Formas	Alimaturahim	Jl. Saranani no.27, Kendari 93111	0401-322683	